

# LAPORAN KINERJA



# 2021



DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN 2022



## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud penerapan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan Kinerja tersebut disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja menguraikan tentang kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 berdasarkan target kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021.

Indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 terdiri dari: 1) Rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 75,2%; 2) Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total area terkena DPI minimal 60,2%; 3) Laporan hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (1.750 LPHP/sertifikat); 4) Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan minimal 3,2 Skala Likert; serta 5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT minimal 3,38 Skala Likert. Pengukuran indikator capaian kinerja rasio serangan OPT/DPI yang dapat ditangani terhadap total area terkena menggunakan data serangan OPT/DPI periode Oktober 2020 – September 2021 disesuaikan dengan periode pertanaman yang berproduksi pada Tahun 2021.

Melalui laporan ini diharapkan capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 dapat diukur serta dipahami faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja tersebut. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk menyusun langkah – langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini sehingga kami dapat menyelesaiannya. Saran dan

masukan dari berbagai pihak tetap kami harapkan sebagai bahan dan perbaikan untuk penyusunan laporan berikutnya.

Jakarta, Februari 2022



Dr. Ir. Mohammad Takdir Mulyadi, M.M

NIP 196304231989031002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu meningkatnya penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim dengan target rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 75,2%; rasio luas areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total areal terkena DPI minimal 60,2%; jumlah sertifikat hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan minimal 1.750 Ihp/sertifikat; meningkatnya kualitas dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan adanya Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan minimal 3,2 skala likert dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT minimal 3,38 skala likert.

Sasaran strategis tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan antara lain : Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI), Gerakan Pengendalian OPT, Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4), Dem Area BTS, Pengujian Mutu Produk Tanaman, serta Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI.

Realisasi rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT dan terkena DPI pada Tahun 2021 sebesar 98,91% dan 78,86%, sehingga apabila dibandingkan dengan target indikator kinerja pengamanan OPT/DPI sebesar 75,2% dan 60,2% maka capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 adalah 131,53% (OPT) dan 131,00% (DPI). Sedangkan jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mencapai 2.449 Ihp/sertifikat (139,94%) dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPMPT mencapai 3,382 Skala Likert dari target 3,38 Skala Likert (100,06%). Sedangkan tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan mencapai 3,38 Skala Likert dari target 3,2 Skala Likert (105,63%).

Jumlah anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 sebesar Rp. 269.955.794.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 265.983.653.443,- atau 98,53% dari pagu anggaran. Sedangkan untuk realisasi kegiatan utama perlindungan tanaman pangan Tahun 2021 antara lain: PPHT 99,4%, PPDPI 100%, Gerakan Pengendalian OPT 100%, Gerakan Penanganan DPI 100%, Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT 100%, Dem Area BTS 100%, Dem Area DPI 100%, Pengujian Mutu Produk Tanaman 139,94%, Sarana Penanganan DPI 100% dan Sarana Pengendalian OPT 100%.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.4. Sumber Daya Manusia .....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
2.1. Perencanaan Kinerja .....	6
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	8
2.3. Kebijakan dan Strategi .....	9
2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2020 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
3.1. Pengukuran Kinerja .....	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	14
3.3. Pelaksanaan Kegiatan Utama .....	22
BAB IV PENUTUP .....	43
LAMPIRAN .....	45

## DAFTAR TABEL

1. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 .....	5
2. Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 .....	7
3. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 .....	10
4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 .....	12
5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun .....	13
6. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPMPT Tahun 2017 – 2021.....	13
7. Perbandingan Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman BPMPT Tahun 2017 – 2021.....	14
8. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 per Komoditas .....	14
9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September).....	15
10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September).....	16
11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September).....	17
12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September) .....	18
13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September).....	19
14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September) .....	20
15. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2020, 2019 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September).....	21
16. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020.....	22

17. Realisasi Kegiatan PPHT Padi, Jagung, Kedelai/Kacang Tanah/Kacang Hijau dan Ubi Kayu.....	24
18. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian .....	26
19. Realisasi Kegiatan Perbanyakkan APH-Refugia.....	27
20. Realisasi Kegiatan Penguatan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH).....	27
21. Realisasi Kegiatan Rubuha.....	28
22. Realisasi Kegiatan Penerapan Penanganan DPI.....	29
23. Realisasi Kegiatan Gerakan Penanganan DPI.....	30
24. Realisasi Kegiatan Dem PDPI.....	31
25. Realisasi Kegiatan Sarana Penanganan DPI.....	32
26. Realisasi Kegiatan Sarana Pengendalian OPT.....	34
27. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan .....	35
28. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.....	36
29. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021.....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

1.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi Oktober 2020 – September 2021.....	46
2.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Oktober 2020 – September 2021.....	47
3.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Oktober 2020 – September 2021.....	48
4.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Oktober 2020 – September 2021.....	49
5.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Hijau Oktober 2020 – September 2021.....	50
6.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Ubi Kayu Oktober 2020 – September 2021.....	51
7.	Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Ubi Jalar Oktober 2020 – September 2021.....	52
8.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi Oktober 2020 – September 2021 .....	53
9.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Jagung Oktober 2020 – September 2021.....	54
10.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kedelai Oktober 2020 – September 2021.....	55
11.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kacang Tanah Oktober 2020 – September 2021.....	56
12.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kacang Hijau Oktober 2020 – September 2021.....	57
13.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Ubi Kayu Oktober 2020 – September 2021.....	58
14.	Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Ubi Jalar Oktober 2020 – September 2021.....	59
15.	Realisasi Kegiatan PPHT Padi Tahun 2021.....	60
16.	Realisasi Kegiatan PPHT Jagung Tahun 2021.....	61
17.	Realisasi Kegiatan Penerapan PHT Kedelai/Kacang Tanah/Kacang Hijau Tahun 2021.....	62

18. Realisasi Kegiatan Penerapan PHT Ubi Kayu Tahun 2021.....	63
19. Realisasi Kegiatan Perbanyakkan APH/Refugia Tahun 2021.....	64
20. Realisasi Kegiatan Rumah Burung Hantu Tahun 2021.....	65
21. Realisasi Kegiatan Pos Pelayanan Agens Hayati Tahun 2021.....	66
22. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Padat Karya Pusat Tahun 2021.....	67
23. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Dekon Tahun 2021.....	68
24. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Padat Karya Pusat Tahun 2021.....	69
25. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Padat Karya Tahun 2021.....	70
26. Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Petani Dalam Pemasyarakatan PHT (P4) Tahun 2021.....	71
27. Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Internal Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021.....	72



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengamanan areal pertanaman pangan dari gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan baik kuantitas maupun kualitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang mempunyai tanggung jawab menjalankan tugas fungsi pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Kegiatan pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan terkena DPI dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan tindakan *pre-emptif* atau bersifat pencegahan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) yang mengutamakan penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan pemberdayaan petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaannya diperkirakan akan terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif*, maka dapat dilakukan tindakan responsif melalui aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH), pestisida nabati atau pestisida kimia dengan tetap melaksanakan prinsip enam tepat (6T) yaitu: tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat mutu. Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan produk tanaman pangan dari senyawa kimia/kandungan logam/residu dan untuk menjamin efektivitas daya kerja pestisida maka dilakukan pengujian mutu produk tanaman oleh BPMPT.

Selain itu, dalam rangka pengamanan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI guna mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menetapkan 5 (lima) program utama yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut :

- Penguatan penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan pengamatan OPT/DPI
- Penguatan sumber daya manusia

- Penguatan sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan data dan kelembagaan perlindungan tanaman pangan

Kebijakan pengendalian OPT dan penanggulangan DPI di atas diimplementasikan melalui kegiatan utama tahun 2021 antara lain:

- Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)
- Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)
- Gerakan Pengendalian OPT Padat Karya
- Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Padat Karya
- Perbanyak Rumah Burung Hantu (Rubuha)
- Pengadaan Bahan perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) /Refugia
- Pengembangan PPAH
- Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4)
- Dem Area Budidaya Tanaman Sehat (BTS)
- Pengujian Mutu Produk Pertanian
- Pengadaan Sarana Penanganan DPI
- Pengadaan Sarana Pengendalian OPT

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, fasilitasi sarana kegiatan yang diberikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah. Mekanisme penyaluran bantuan diatur sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan (PKMK) nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan diadaptasikan kedalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2021.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam mengamankan pertanaman tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI menetapkan target rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 75,2% dan rasio luas area terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total area terkena DPI minimal 60,2%. Dalam rangka mendukung target pengamanan dimaksud, maka dibutuhkan adanya sinergi dan koordinasi berbagai instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- 3) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim; dan
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

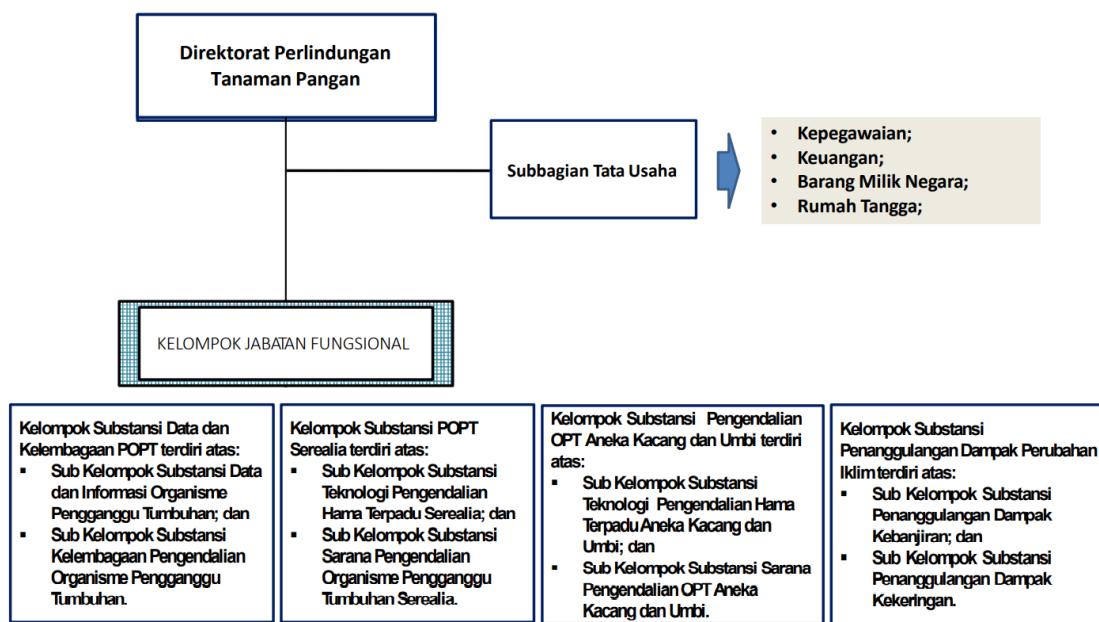
## 1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- 1) Kelompok Substansi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- 2) Kelompok Substansi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.

- 3) Kelompok Substansi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.
- 4) Kelompok Substansi Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim.

Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan karsipan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan**

#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sampai pada tahun 2021 berjumlah 72 orang, terdiri dari Pegawai Negeri sebanyak 63 orang dan THL sebanyak 9 orang. Rincian keadaan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021

<b>No.</b>	<b>Unit</b>	<b>Golongan</b>				<b>THL</b>	<b>JML</b>
		<b>IV</b>	<b>III</b>	<b>II</b>	<b>I</b>		
1	Direktur	1	-	-	-	-	1
2	Subbagian Tata Usaha	1	6	4	-	6	17
3	Subdit. Kelembagaan Data dan Pengendalian OPT	3	11	-	-	-	14
4	Subdit. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	3	9	-	-	1	13
5	Subdit. Pengendalian OPT Serealia	1	12	2	-	1	16
6	Subdit. Pengendalian OPT Akabi	2	8	-	-	1	11
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>72</b>

## II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun serta memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Keselarasan Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian sasaran produksi.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2021 di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Satker Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Pusat) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.830.749.000,-. Sedangkan untuk alokasi Dana Dekonsentrasi Rp. 117.125.045.000,-.

Alokasi kegiatan utama Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021

No	Kegiatan Utama	Target		
		Fisik	Anggaran (Rp)	
1	Penerapan PHT Padi	3,350	hektar	5,112,770,000
2	Penerapan PHT Jagung	330	hektar	511,960,000
3	Penerapan PHT Kedelai/Kc. Tanah/Kc. Hijau	285	hektar	502,759,500
4	Penerapan PHT Ubi Kayu	30	hektar	52,980,000
5	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Pusat	4,000	hektar	1,800,000,000
6	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Pusat	1,000	hektar	450,000,000
7	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Dekon	990	hektar	440,863,600
8	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Dekon	29,688	hektar	13,349,586,000
9	Perbanyakkan APH/Refugia	78	unit	1,713,685,100
10	Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)	62	unit	620,000,000
11	Rumah Burung Hantu (Rubuha)	633	unit	1,266,000,000
12	Pengujian Mutu Produk	1,750	Ihp	3,958,716,527
13	Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)	620	hektar	2,833,667,000
14	Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan)	9,483	hektar	3,507,438,900
15	Gerakan penanganan Banjir/kekeringan (ABT)	1,000	hektar	400,000,000
16	DEM PDPI	5,000	hektar	7,500,000,000
17	Dem PDPI (ABT)	3,100	hektar	4,650,000,000
18	Pompa Air	500	unit	7,002,919,900
19	Pompa Air ABT Tahap I	215	unit	3,899,154,000
20	Pompa Air ABT Tahap II	56	unit	700,000,000
21	Sumur Bor	2	unit	100,000,000
22	Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT	120	unit	3,987,909,950
23	Dem Area BTS (ABT)	35,610	hektar	55,716,437,450
24	Pestisida	151,225	hektar	30,244,000,000
25	Herbisida	4,960	hektar	619,177,000
26	Hand Sprayer	1,500	unit	863,750,000
<b>TOTAL</b>				<b>151,803,774,927</b>

## 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

### 1) Visi

Terwujudnya sistem pengamanan areal pertanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan adaptasi perubahan iklim.

### 2) Misi

- a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.
- b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman.
- e. Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan OPT dan DPI.

### 3) Tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan dalam pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi tanaman pangan.

### 4) Sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. Meningkatnya fungsi sistem pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT serta penanganan DPI.
- b. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan.
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman dalam pemahaman dan penerapan sistem perlindungan tanaman pangan.
- d. Tersedianya informasi teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT yang efektif dan efisien.
- e. Terlaksananya gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI secara terpadu dalam skala luas.
- f. Terkendalinya luas serangan OPT dan gangguan DPI pada tanaman pangan.
- g. Meningkatnya mutu dan daya saing produk tanaman pangan.

### 2.3. Kebijakan dan Strategi

Perlindungan tanaman pangan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil sesuai dengan sasaran produksi tanaman pangan. Pelaksanaannya dengan mendorong kemandirian petani dalam penanganan OPT dan DPI, sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan informasi, teknologi dan bantuan sarana pengendalian dalam keadaan eksplosi. Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan perlindungan tanaman pangan, program perlindungan tanaman pangan mencakup lima subsistem perlindungan sebagai fokus kegiatan yaitu: 1) Penguatan Pengamatan dan Pengendalian Dini, 2) Penerapan Teknologi, 3) Penguatan Kelembagaan, 4) Penguatan SDM, 5) Penyediaan Sarana Pengendalian OPT/DPI.

Kebijakan pengendalian OPT adalah pelaksanaan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dengan mengedepankan tindakan *pre-emptif*. Prinsip PHT meliputi penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan mendorong petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaan pengamanan pertanaman terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif* maka dilakukan secara responsif menggunakan bahan pengendali kimia secara 6 (enam) tepat yaitu tepat sasaran, jenis, dosis, cara, waktu dan mutu. Selain itu untuk pengamanan produksi yang akan dikonsumsi, perlu dilakukan pengujian mutu produk tanaman.

Berdasarkan kebijakan dan strategi diatas Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan utamanya adalah penerapan PHT (PPHT), penerapan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI), gerakan pengendalian OPT padat karya, gerakan penanganan DPI padat karya, sarana penanganan DPI, sarana pengendalian OPT, perbanyak rumah burung hantu, perbanyak agens pengendali hayati/refugia, PPAH, Dem Area Budidaya Tanaman Sehat dan Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4).

## 2.4. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021

Dalam rangka mengukur kinerja perlindungan tanaman pangan secara akurat, maka ditetapkan Indikator Kinerja Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3. Indikator ini menggambarkan capaian upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI dan peningkatan mutu produk serta pelayanan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Tabel 3. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT (%)	75,2%
		Rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena (%)	60,2%
		Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	1.750
2	Meningkatnya kualitas layanan managemen unit kerja	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan <i>stakeholder</i> terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (skala likert)	3,2
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (skala likert)	3,38

Ket: data luas serangan OPT dan DPI yang digunakan adalah periode Okt 2020 – Sep 2021

Upaya pencapaian sasaran strategis pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dilakukan melalui beberapa kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan baik di daerah maupun di pusat berupa fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI serta pengujian mutu produk tanaman. Jumlah anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 269.955.794.000,-.

### **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terkait rasio serangan OPT/DPI yang dapat ditangani diperoleh dengan membandingkan luas serangan/terkena OPT/DPI yang dapat ditangani dengan total luas serangan/terkena. Data luas serangan OPT dan DPI diperoleh dari hasil pengamatan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang dilaporkan ke Koordinator POPT di tingkat kabupaten/kota setiap dua minggu sekali, kemudian Koordinator POPT melaporkan ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan selanjutnya disampaikan ke Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) di tingkat provinsi. Rekap data serangan OPT/DPI per kabupaten selanjutnya dilaporkan oleh BPTPH ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Capaian jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman diukur berdasarkan realisasi jumlah sertifikat/LHP dibandingkan dengan target. Sedangkan Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur berdasarkan data kuesioner yang diisi oleh pelanggan BPMPT. Sementara untuk tingkat kepuasan pegawai dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan diukur berdasarkan indeks kepuasan melalui pengisian kuisioner oleh pegawai Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Hasil survei atau pengisian kuesioner kemudian dihitung menggunakan analisis interval dengan menghitung secara kuantitatif jawaban – jawaban dari responden dan diberi nilai atau likert. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan TP Tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT (%)	75,2	98,91	131,53
2	Rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena (%)	60,2	78,86	131,00
3	Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LHP/sertifikat)	1.750	2.449	139,94
4	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (skala likert)	3,2	3,38	105,63
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (skala likert)	3,38	3,382	100,06
				<b>122,20</b>

Berdasarkan indikator kinerja target rasio luas serangan/terkena OPT/DPI yang dapat ditangani terhadap total serangan OPT/DPI adalah minimal 75,2% dan 60,2%. Realisasi rasio serangan OPT yang dapat ditangani dari gangguan OPT sebesar 98,91% dan DPI sebesar 78,86% sehingga capaian kinerjanya masing-masing adalah 131,53% dan 131,00%. Sedangkan indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan tahun 2021 mencapai 3,382 Skala Likert (100,06%) dengan realisasi jumlah sertifikat pengujian 2.449 LHP (139,94%) dari target sebesar 1.750 LHP. Sementara untuk hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan internal Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2021 dengan analisis skala Likert adalah 3,38 Skala Likert (105,63%)

Penilaian terhadap capaian target indikator kinerja dilakukan dengan metode *scoring* yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil = capaian realisasi >100%
2. Berhasil = capaian realisasi 80 – 100%
3. Cukup Berhasil = capaian realisasi 60 – 79%

4. Kurang Berhasil = capaian realisasi <60%

Dengan metode skoring di atas, maka capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 sebesar 122,2% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil (>100%)**.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020, Tahun 2019 dan Rerata 5 Tahun

Indikator Kinerja	Tahun 2021 (%)		Tahun 2020 (%)		Rerata 5 Tahun (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1 Rasio Serangan OPT yang dapat ditangani terhadap Total Luas Serangan OPT	75.2	98.91	75.2	98.54	75.2	98.51
2 Rasio Luas Areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan Total Areal Terkena DPI	60.2	78.86	60.2	79.37	60.2	70.74

Data periode laporan 14 Januari 2022

Berdasarkan tabel di atas realisasi indikator kinerja rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tahun 2021 (98,91%) lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 (98,54%) dan rerata 5 tahun (98,51%). Sedangkan untuk DPI tahun 2021 (78,86%) lebih rendah dari tahun 2020 (79,73%) akan tetapi lebih tinggi dari rerata 5 tahun (70,74%).

Berdasarkan Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelaksanaan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, dan perhitungan sembilan nilai unsur pelayanan dengan kuesioner, didapatkan nilai IKM BPMPT sebesar 91,00 (kategori mutu pelayanan sangat baik). Secara umum, nilai IKM BPMPT periode Januari – Desember 2021 adalah 84,55 atau 3,382 skala likert dengan kategori mutu pelayanan baik. Perbandingan realisasi IKM atas layanan BPMPT dan realisasi sertifikasi hasil pengujian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPMPT Tahun 2017 – 2021

Tahun	Indikator Kinerja	
	Target	Realisasi
2017	3.38	3.32 98.22%
2018	3.38	3.27 96.75%
2019	3.38	3.23 95.68%
2020	3.38	3.33 98.61%
2021	3.38	3.38 100.06%

Tabel 7. Perbandingan Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman BPMPT Tahun 2017 – 2021

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	
2017	2,350	2,717	115.62%
2018	2,385	2,614	109.60%
2019	2,450	2,495	101.84%
2020	1,600	1,615	100.94%
2021	1,750	2,499	142.80%

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Secara rinci, capaian pelaksanaan kegiatan pengamanan tanaman dari serangan OPT dan DPI adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 per Komoditas

NO	KOMODITAS	SERANGAN OPT/DPI (Ha)				AREAL TERSELAMATKAN OPT/DPI			
		OPT		DPI		OPT		DPI	
		T	P	T	P	Ha	%	Ha	%
1	Padi	348,563	4,470	414,263	86,241	344,093	98.72	328,022	79.18
2	Jagung	77,781	162	28,629	5,573	77,619	99.79	23,056	80.53
3	Kedelai	1,310	56	2,556	1,061	1,254	95.73	1,496	58.51
4	Kacang Tanah	1,494	5	474	135	1,489	99.64	339	71.57
5	Kacang Hijau	484	26	5,107	2,348	458	94.63	2,759	54.02
6	Ubi Kayu	1,823	1	275	49	1,822	99.92	226	82.16
7	Ubi Jalar	454	-	58	0	454	100.00	58	99.49
<b>JUMLAH</b>		<b>431,910</b>	<b>4,721</b>	<b>451,361</b>	<b>95,407</b>	<b>427,189</b>	<b>98.91</b>	<b>355,955</b>	<b>78.86</b>

Ket : T= Terkena, P = Puso, Update tanggal 14 Januari 2021

Berdasarkan tabel di atas, persentase areal yang dapat ditangani akibat serangan OPT apabila dibandingkan dengan total luas serangan OPT berkisar 94,63% sampai dengan 100% dimana persentase tertinggi adalah komoditas ubi jalar sedangkan terendah pada komoditas kacang hijau. Sementara itu, persentase areal yang dapat ditangani akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) berkisar 54,02% sampai dengan 99,49% dimana persentase tertinggi terjadi pada komoditas ubi jalar dan terendah pada komoditas kacang hijau.

#### 1. Pengamanan Tanaman Padi

Target pengamanan pertanaman tanaman padi dari serangan OPT utama dan terkena DPI (banjir/kekeringan) tahun 2021 yaitu 75,2% dan 60,2%. Luas

areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama seluas 348.563 ha, sedangkan seluas 4.470 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat ditangani dari serangan OPT seluas 344.093 ha atau mencapai 98,72% dari total luas areal terserang OPT. Luas areal pertanaman padi yang terkena DPI tahun 2021 seluas 414.263 ha, seluas 86.241 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat ditangani dari total luas areal yang terkena DPI seluas 328.022 ha atau mencapai 79,18%.

Realisasi capaian indikator kinerja pengamanan produktivitas padi dari serangan OPT pada tahun 2021 mencapai 131,27%. Dengan demikian capaian indikator kinerja (OPT) pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2020 (130,56%) dan rerata 5 tahun (130,88%). Sedangkan untuk pengamanan terhadap DPI tahun 2021 mencapai 131,53%, lebih besar apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 (130,04%) dan rerata 5 tahun (116,12%).

Tabel 9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	372,022	5,877	386,741	7,045	348,563	4,470
Banjir & Kekeringan (DPI)	468,098	140,870	493,435	107,143	414,263	86,241
Areal terselamatkan OPT	366,146		379,696		344,093	
Areal terselamatkan DPI	327,228		386,292		328,022	
Nilai IK (%) OPT	98.42		98.18		98.72	
Nilai IK (%) DPI	69.91		78.29		79.18	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	130.88		130.56		131.27	
Capaian (%) DPI	116.12		130.04		131.53	

Data periode laporan 14 Januari 2022

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil (116,12% - 131,53%).

## 2. Pengamanan Tanaman Jagung

Target pengamanan tanaman jagung dari serangan OPT dan terkena DPI tahun 2021 yaitu 75,2% dan 60,2% dari total areal terserang/terkena OPT

dan DPI. Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama jagung pada periode Oktober 2020 – September 2021 seluas 77.781 ha dan seluas 162 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman jagung yang dapat ditangani seluas 77.619 ha atau mencapai 99,8% dari total luas serangan OPT. Luas areal pertanaman jagung yang terkena DPI seluas 28.629 ha dan 5.573 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman jagung yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI periode Oktober 2020 – September 2021 adalah 23.056 Ha atau mencapai 80,5% dari total areal terkena DPI.

Apabila dibandingkan dengan target pengamanan areal pertanaman dari serangan OPT/DPI sebesar 75,2% dan 60,2%, maka realisasi tersebut mencapai 132,7% untuk OPT sedangkan untuk DPI realisasinya mencapai 133,8%. Capaian kinerja untuk rasio OPT yang dapat ditangani pada tahun 2021 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 (132,1%) dan rerata 5 tahun (132,3%). Sedangkan untuk DPI pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 (144,2%) dan lebih tinggi dari rerata 5 tahun (127,3%).

Tabel 10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	27,374	147	168,489	1,099	77,781	162
Banjir & Kekeringan (DPI)	75,868	17,721	68,190	9,003	28,629	5,573
Areal terselamatkan OPT	27,227		167,390		77,619	
Areal terselamatkan DPI	58,147		59,187		23,056	
Nilai IK (%) OPT	99.5		99.3		99.8	
Nilai IK (%) DPI	76.6		86.8		80.5	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	132.3		132.1		132.7	
Capaian (%) DPI	127.3		144.2		133.8	

Data periode laporan 14 Januari 2022

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil dengan kisaran capaian 127,3% - 144,2%.

### 3. Pengamanan Tanaman Kedelai

Target luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI sebesar 75,2% Dan 60,2%. Pada periode Oktober 2020 – September 2021, luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama seluas 1.310 ha dan 56 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT Tahun 2021 seluas 1.254 ha atau mencapai 95,7%. Sedangkan luas areal pertanaman kedelai yang terkena DPI seluas 2.556 ha dan seluas 1.061 ha diantaranya mengalami puso. Realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI Tahun 2021 seluas 1.496 ha atau mencapai 58,5%.

Dengan demikian, realisasi capaian indikator kinerja pengamanan areal dari serangan OPT pada tahun 2021 mencapai 127,3% dari target sebesar 75,2%, capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan pada tahun 2020 (130,2%) dan rerata 5 tahun (132%). Sedangkan untuk DPI realisasinya mencapai 97,2% dari target sebesar 60,2%, lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 (122,6%) akan tetapi lebih tinggi dari rerata 5 tahun (94,3%).

Tabel 11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	3,879	27	1,113	23	1,310	56
Banjir & Kekeringan (DPI)	9,753	4,215	656	172	2,556	1,061
Areal terselamatkan OPT	3,852		1,090		1,254	
Areal terselamatkan DPI	5,537		484		1,496	
Nilai IK (%) OPT	99.3		97.9		95.7	
Nilai IK (%) DPI	56.8		73.8		58.5	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	132.0		130.2		127.3	
Capaian (%) DPI	94.3		122.6		97.2	

Data periode laporan 14 Januari 2022

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori berhasil-sangat berhasil (94,3% – 132%).

#### 4. Pengamanan Tanaman Kacang Tanah

Target luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75,2% untuk OPT dan 60,2% untuk DPI. Pada Oktober 2020 – September 2021, luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama seluas 1.494 ha dan 5 ha mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT tahun 2021 seluas 1.489 ha atau mencapai 99,6%.

Sedangkan luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena DPI seluas 474 ha dan seluas 135 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI tahun 2021 seluas 339 ha atau mencapai 71,6%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 75,2 dan 60,2%, maka realisasi capaian indikator kinerja pengamanan areal pertanaman dari total luas serangan OPT mencapai 132,5%. Sedangkan capaian pengamanan areal pertanaman dari DPI realisasinya mencapai 118,9%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	1,829	2	1,793	1	1,494	5
Banjir & Kekeringan (DPI)	2,681	440	1,166	159	474	135
Areal terselamatkan OPT	1,827		1,792		1,489	
Areal terselamatkan DPI	2,240		1,008		339	
Nilai IK (%) OPT	99.9		99.9		99.6	
Nilai IK (%) DPI	83.6		86.4		71.6	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	132.8		132.9		132.5	
Capaian (%) DPI	138.8		143.5		118.9	

Data periode laporan 14 Januari 2022

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil (118,9 – 143,5%).

## 5. Pengamanan Tanaman Kacang Hijau

Target luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75,2% (OPT) dan 60,2% (DPI). Pada periode Oktober 2020 – September 2021, luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama seluas 484 ha dan 26 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2021 seluas 458 ha atau mencapai 94,63%. Sedangkan untuk luas DPI dilaporkan seluas 5.107 ha dengan jumlah puso seluas 2.348 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI tahun 2021 seluas 2.759 ha atau mencapai 54,02%.

Tabel 13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	669	4	672	-	484	26
Banjir & Kekeringan (DPI)	2,020	185	89	27	5,107	2,348
Areal terselamatkan OPT	665		672		458	
Areal terselamatkan DPI	1,834		63		2,759	
Nilai IK (%) OPT	99.40		100.00		94.63	
Nilai IK (%) DPI	90.82		70.03		54.02	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	132.18		132.98		125.84	
Capaian (%) DPI	150.86		116.33		89.73	

Data periode laporan 14 Januari 2022

Areal pertanaman yang dapat diamankan dari serangan OPT sebesar 94,63% dari target 75,2% sehingga capaian indikatornya sebesar 125,84%. Areal pertanaman yang dapat diamankan dari DPI sebesar 54,02% dengan capaian indikator sebesar 89,73%. Capaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan rerata 5 tahun baik untuk OPT dan DPI seperti dapat dilihat pada tabel di atas.

## 6. Pengamanan Tanaman Ubi Kayu

Target luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75,2% untuk OPT dan 60,2% untuk DPI. Tahun 2021, luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama seluas 1.823 ha puso seluas 1 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2021 seluas 1.822 ha atau mencapai 99,92%. Luas areal terkena DPI pada ubi kayu tahun 2021 dilaporkan mencapai 275 ha, dan 49 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI Tahun 2021 mencapai 226 Ha atau 82,16%.

Apabila dibandingkan dengan target sebesar 75,2% untuk OPT dan 60,2% untuk DPI, maka realisasi pengamanan dari serangan OPT mencapai 132,87% sedangkan untuk DPI realisasinya mencapai 136,47%. Capaian kinerja untuk rasio OPT yang dapat ditangani pada ubi kayu tahun 2021 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 (132,19%) dan rerata 5 tahun (130,17%). Sedangkan untuk DPI pada tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 (165,43%) dan lebih tinggi dari rerata 5 tahun (125,44%).

Tabel 14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	2,094	44	1,378	8	1,823	1
Banjir & Kekeringan (DPI)	657	161	1,223	5	275	49
Areal terselamatkan OPT	2,050		1,370		1,822	
Areal terselamatkan DPI	496		1,218		226	
Nilai IK (%) OPT	97.89		99.41		99.92	
Nilai IK (%) DPI	75.51		99.59		82.16	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	130.17		132.19		132.87	
Capaian (%) DPI	125.44		165.43		136.47	

Data periode laporan 14 Januari 2022

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT utama ubi kayu dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil (125,44% – 165,43%).

## 7. Pengamanan Tanaman Ubi Jalar

Target luas areal pertanaman ubi jalar yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT utama dan terkena DPI minimal sebesar 75,2% untuk OPT dan 60,2% untuk DPI. Pada bulan Oktober 2020 – September 2021, luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama seluas 454 ha, dan dari total luas terkena OPT tersebut dilaporkan tidak terjadi puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman ubi jalar yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2021 seluas 454 ha atau mencapai 100%.

Pertanaman ubi jalar pada Tahun 2021 yang terkena DPI sebesar 58 ha dan 0,3 ha, sehingga luas areal yang dapat diamankan seluas 57,7 ha (99,49%). Apabila dibandingkan dengan target sebesar 75,2% untuk OPT dan 60,2% untuk DPI, maka realisasi tersebut mencapai 132,98% dan 165,26%. Perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan rerata 5 tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2021, 2020 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

OPT & DPI	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
OPT	331	0	326	-	454	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	12	10	11	3	58	0.3
Areal terselamatkan OPT	331		326		454	
Areal terselamatkan DPI	3		8		57.7	
Nilai IK (%) OPT	100.00		100.00		100.00	
Nilai IK (%) DPI	23.02		72.73		99.49	
TARGET IK (%) OPT	75.2		75.2		75.2	
TARGET IK (%) DPI	60.2		60.2		60.2	
Capaian (%) OPT	132.98		132.98		132.98	
Capaian (%) DPI	38.24		120.81		165.26	

Data periode laporan 14 Januari 2022

### 3.3. Pelaksanaan Kegiatan Utama

#### A. Realisasi Kegiatan Utama

Capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan hasil dari pelaksanaan beberapa kegiatan utama perlindungan tanaman pangan Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan  
Tahun 2021

	Kegiatan Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)		
		Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran	
1	Penerapan PHT Padi	3,350	hektar	5,135,600,000	3,325	5,112,770,000	99.25	99.56
2	Penerapan PHT Jagung	330	hektar	512,540,000	330	511,960,000	100.00	99.89
3	Penerapan PHT Kedelai/Kc. Tanah/Kc. Hijau	285	hektar	503,210,000	285	502,759,500	100.00	99.91
4	Penerapan PHT Ubi Kayu	30	hektar	52,980,000	30	52,980,000	100.00	100.00
5	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Pusat	4,000	hektar	1,800,000,000	4,000	1,800,000,000	100.00	100.00
6	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Pusat	1,000	hektar	450,000,000	1,000	450,000,000	100.00	100.00
7	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Dekon	990	hektar	442,606,000	990	440,863,600	100.00	99.61
8	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Dekon	29,688	hektar	13,368,600,000	29,688	13,349,586,000	100.00	99.86
9	Perbanyak APH/Refugia	78	unit	1,713,905,000	78	1,713,685,100	100.00	99.99
10	Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)	62	unit	620,000,000	62	620,000,000	100.00	100.00
11	Rumah Burung Hantu (Rubuha)	633	unit	1,266,000,000	633	1,266,000,000	100.00	100.00
12	Pengujian Mutu Produk	1,750	Ihp	4,025,244,000	2,449	4,001,667,380	139.94	99.41
13	Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)	620	hektar	2,837,978,000	620	2,833,667,000	100.00	99.85
14	Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan)	9,483	hektar	3,768,700,000	8,882	3,507,438,900	93.66	93.07
15	Gerakan penanganan Banjir/kekeringan (ABT)	1,000	hektar	400,000,000	1,000	400,000,000	100.00	100.00
16	Dem PDPI	5,000	hektar	7,500,000,000	5,000	7,500,000,000	100.00	100.00
17	Dem PDPI (ABT)	3,100	hektar	4,650,000,000	3,100	4,650,000,000	100.00	100.00
18	Pompa Air	500	unit	7,002,920,000	500	7,002,919,900	100.00	100.00
19	Pompa Air ABT Tahap I	215	unit	3,899,154,000	215	3,899,100,000	100.00	100.00
20	Pompa Air ABT Tahap II	56	unit	700,000,000	56	686,041,500	100.00	98.01
21	Sumur Bor	2	unit	100,000,000	2	100,000,000	100.00	100.00
22	Pemberdayaan Petani dalam Pemasayarakatan PHT	120	unit	3,996,000,000	120	3,987,909,950	100.00	99.80
23	Dem Area BTS (ABT)	35,610	hektar	56,835,300,000	35,610	55,716,437,450	100.00	98.03
24	Pestisida	151,225	hektar	30,245,000,000	151,225	30,244,000,000	100.00	100.00
25	Herbisida	4,960	hektar	620,000,000	4,960	619,177,000	100.00	99.87
26	Hand Sprayer	1,500	unit	865,002,000	1,500	863,750,000	100.00	99.86

Data s.d. 21 Januari 2021

## 1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) serealia merupakan kegiatan pemasarakatan PHT di tingkat petani yang memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani non alumni SLPHT. Kegiatan PPHT Serealia dilaksanakan pada komoditas padi dan jagung. Penerapan pengendalian hama terpadu dilaksanakan pada areal hamparan yang luas, untuk PPHT padi dilaksanakan hamparan seluas 25 ha, sedangkan PPHT jagung dilaksakan pada hamparan seluas 15 ha. Kegiatan PPHT Serealia meliputi kegiatan persiapan yang dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan tujuan sosialisasi dan koordinasi. Pertemuan koordinasi merupakan kegiatan perencanaan untuk pemetaan masalah, penelusuran sejarah budidaya tanaman yang sudah dilakukan dan penyusunan rencana aksi yang akan dilakukan. Kegiatan selanjutnya adalah pertemuan mingguan selama 11 minggu untuk diskusi dan evaluasi hasil pengamatan lapangan dari minggu pertama setelah tanam sampai menjelang panen.

Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) tanaman kedelai/kacang hijau/kacang tanah merupakan kegiatan pemberdayaan petani untuk menerapkan PHT dalam usaha budidaya tanaman kedelai/kacang hijau/kacang tanah, tidak harus berada dalam satu hamparan dan tanpa dibatasi wilayah administrasi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PPHT Kedelai/Kacang hijau/Kacang tanah antara lain:

- 1) Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistemnya sesuai dengan prinsip PHT.
- 2) Mengimplementasikan PHT dalam mengamankan areal pertanaman kedelai/kacang hijau/kacang tanah dari gangguan OPT.

Pada tahun 2021 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasi kegiatan PPHT Padi seluas 3.350 ha dengan pagu anggaran Rp. 5.135.600.000,- dan PPHT Jagung seluas 330 ha dengan pagu anggaran Rp. 512.540.000,-. PPHT kedelai/kacang tanah/kacang hijau seluas 285 ha yang tersebar di 20 provinsi dengan pagu anggaran Rp. 503.210.000,- dan PPHT ubi kayu seluas 30 ha dengan pagu anggaran Rp. 52.980.000,-.

Realisasi PPHT padi tahun 2021 sebanyak 3.325 unit (99,3%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.112.770.000,- (99,6%). Realisasi fisik kegiatan PPHT padi tidak mencapai 100% karena kegiatan tersebut tidak terlaksana di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana ke rekening kelompok tani sehingga petani tidak bersedia melaksanakan kegiatan dimaksud karena sudah melakukan penanaman sebelum bantuan diterima, adapun dana bantuan tersebut sudah dikembalikan kepada negara.

Sedangkan untuk realisasi PPHT jagung sebanyak 330 unit (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 511.960.000,- (99,9%), realisasi PPHT kedelai/kacang tanah/kacang hijau sebanyak 285 unit (100%) dengan realisasi anggaran Rp. 502.759.500,- (99,9%), sedangkan PPHT ubi kayu realisasi fisik sebanyak 30 unit (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.980.000,- (100%).

Secara rinci realisasi kegiatan PPHT Serealia dan Akabi tersaji pada tabel berikut :

Tabel 17. Realisasi Kegiatan PPHT Padi, Jagung, Kedelai/Kacang Tanah/Kacang Hijau dan Ubi Kayu

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Penerapan PHT Padi (Ha)	3,350	5,135,600,000	3,325	99.3	5,112,770,000	99.6
2	Penerapan PHT Jagung (Ha)	330	512,540,000	330	100.0	511,960,000	99.9
3	Penerapan PHT Kedelai/Kc. Tanah/Kc. Hijau (Ha)	285	503,210,000	285	100.0	502,759,500	99.9
4	Penerapan PHT Ubi Kayu (Ha)	30	52,980,000	30	100.0	52,980,000	100.0
<b>Jumlah</b>		<b>3,995</b>	<b>6,204,330,000</b>	<b>3,970</b>	<b>99.4</b>	<b>6,180,469,500</b>	<b>99.6</b>

## 2. Gerakan Pengendalian OPT

Gerakan pengendalian (Gerdal) OPT serealia merupakan kegiatan pengendalian OPT secara responsif pada tanaman padi dan jagung. Tujuan dilaksankannya Gerdal OPT adalah untuk menurunkan populasi dan/atau intensitas serangan OPT pada areal pertanaman padi dan jagung yang terserang OPT agar populasi dan intensitas serangannya tidak meningkat dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani. Pelaksanaan Gerdal OPT Serealia dilakukan secara bersama-sama pada areal yang luas. Pelaksana Gerdal OPT Serealia adalah semua pemangku kepentingan sektor tanaman pangan, baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah.

Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi (Gerdal OPT Akabi) adalah bagian dari tindakan pengelolaan untuk menekan populasi/serangan OPT pada tanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, dan ubi kayu di masa pandemi covid-19, baik melalui upaya preemptif maupun responsif. Tujuan dilaksanakannya gerdal OPT Akabi padat karya antara lain:

- 1) Mengendalikan OPT Akabi dalam rangka mendukung pengamanan produksi tanaman pangan di masa pandemi covid-19.
- 2) Menggerakkan petani dan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan pengendalian OPT Akabi di masa pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan Gerdal OPT padi serealia Dekon seluas 29.688 ha dengan pagu anggaran Rp. 13.368.600.000,-, Gerdal OPT Akabi Pusat seluas 1.000 ha dengan pagu anggaran Rp. 450.000.000,- dan Gerdal padat karya Akabi Dekon seluas 990 Ha dengan pagu anggaran sebesar Rp. 442.606.000,-.

Realisasi kegiatan Gerdal OPT padi serealia Dekon tahun 2021 seluas 29.668 Ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 13.349.586.000,- (99,9%), realisasi gerdal Akabi Dekon seluas 990 Ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 440.863.600,- (99,6%) dan realisasi Gerdal padat karya Akabi Pusat seluas 1.000 Ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (100%).

Sedangkan untuk gerakan pengendalian OPT Serealia Padat Karya Pusat, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai alokasi seluas 4.000 ha dengan pagu anggaran Rp. 1.800.000.000,-. Realisasi kegiatan padat karya gerakan pengendalian OPT serealia alokasi pusat sampai pada tahun 2021 sebanyak 4.000 ha (100%) dengan serapan anggaran Rp. 1.800.000.000,- (100%),

Secara rinci realisasi kegiatan Gerdal OPT Serealia, Akabi dan Gerdal padat karya Akabi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Pusat (Ha)	4,000	1,800,000,000	4,000	100.0	1,800,000,000	100.0
2	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Pusat (Ha)	1,000	450,000,000	1,000	100.0	450,000,000	100.0
3	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Dekon (Ha)	990	442,606,000	990	100.0	440,863,600	99.6
4	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Dekon (Ha)	29,688	13,368,600,000	29,688	100.0	13,349,586,000	99.9
<b>Jumlah</b>		<b>35,678</b>	<b>16,061,206,000</b>	<b>35,678</b>	<b>100.0</b>	<b>16,040,449,600</b>	<b>99.9</b>

### 3. Perbanyakkan APH-Refugia

Agens Pengendali Hayati (APH) merupakan salah satu bahan pengendali OPT yang cukup potensial untuk mengendalikan OPT pada tahap awal serangan. Agens Pengendali Hayati efektif dan relatif aman digunakan untuk mengendalikan serangan OPT sejak dini. Agens pengendali hayati digunakan untuk mengendalikan OPT pada keadaan populasi atau intensitas serangan yang masih relatif rendah, dengan tujuan agar populasi atau intensitas serangan OPT tidak berkembang dan meningkat sehingga menyebabkan kerugian ekonomi. Penggunaan APH sangat direkomendasikan untuk mengendalikan OPT tanaman pangan sejak awal, agar keberadaan OPT terkendali, tidak menimbulkan kerusakan tanaman dan kerugian ekonomi lebih lanjut. Tanaman berbunga sebagai refugia berperan sebagai mikrohabitat untuk mendukung konservasi musuh alami OPT. Tanaman refugia dapat berfungsi sebagai tempat singgah, berlindung dan bereproduksi bagi musuh alami OPT. Disamping itu tanaman refugia juga mampu menjadi sumber pakan alternatif bagi musuh alami OPT berupa (nektar dan pollen). Berdasarkan kegunaannya tersebut, maka pengembangan dan perbanyakkan beberapa jenis APH dan tanaman refugia perlu terus dilakukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pengendali OPT.

Pada tahun 2021 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan perbanyakkan APH-Refugia sebanyak 78 unit dengan pagu anggaran Rp. 1.713.905.000,-. Realisasi kegiatan perbanyakkan APH-Refugia tahun 2021 sebanyak 78 unit (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.713.685.100,-. Secara rinci realisasi kegiatan perbanyakkan APH-refugia tersaji pada tabel berikut :

Tabel 19. Realisasi Kegiatan Perbanyakan APH-Refugia

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Perbanyakan APH/Refugia (Unit)	78	1,713,905,000	78	100.0	1,713,685,100	100.0
	Jumlah	78	1,713,905,000	78	100.0	1,713,685,100	100.0

#### 4. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)

Agens Pengendali Hayati (APH) sebagai bahan pengendali OPT harus tersedia di lapangan dan dapat dengan mudah diakses oleh petani. Untuk itu perbanyak APH harus ada di tingkat lapang/kelompok tani agar mudah di dapatkan oleh petani untuk mengendalikan OPT yang menyerang tanaman usaha taninya. Untuk mendukung pengembangan APH dan ketersediaanya di tingkat lapang, maka perlu dilakukan kegiatan yang mendukung peningkatan layanan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) kepada petani dalam menyediakan APH. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan penguatan sarana kegiatan PPAH yang dapat digunakan untuk menambah sarana produksi berupa bahan dan alat perbanyak APH. Penambahan sarana produksi PPAH ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif PPAH dalam melakukan kegiatan pengembangan dan perbanyak APH yang dibutuhkan oleh petani disekitarnya.

Pada Tahun 2021 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan penguatan sarana Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) sebanyak 62 unit dengan pagu anggaran Rp. 620.000.000,- Realisasi kegiatan penguatan sarana PPAH tahun 2021 sebanyak 62 unit (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 620.000.000,- (100%). Secara rinci realisasi kegiatan penguatan PPAH tersaji pada tabel berikut:

Tabel 20. Realisasi Kegiatan Penguatan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) (Unit)	62	620,000,000	62	100.0	620,000,000	100.0
	Jumlah	62	620,000,000	62	100.0	620,000,000	100.0

#### 5. Rumah Burung Hantu (Rubuha)

Burung hantu merupakan burung karnivor yang aktif pada malam hari (*nocturnal*). Burung hantu merupakan binatang pemburu tikus yang handal,

sehingga dapat menjadi predator alami yang efektif untuk mengendalikan hama tikus. Burung hantu yang efektif mengendalikan tikus berasal dari Famili Tytonidae, salah satunya dari genus *Tyto* (*Tyto alba*). Serangan hama tikus di beberapa wilayah sentra produksi padi cukup merepotkan, bahkan beberapa diantaranya menyebabkan puso, untuk itu harus terus dicari alternatif cara pengendaliannya yang efektif dan efisien. Dengan demikian perlu dikembangkan kegiatan yang dapat memfasilitasi konservasi dan pemberdayaan burung hantu sebagai agens pengendali hama tikus.

Pada tahun 2021 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan perbanyak rumah burung hantu (Rubuha) sebanyak 633 unit dengan pagu anggaran Rp. 1.266.000.000,-. Realisasi kegiatan perbanyak Rubuha sebanyak 633 unit (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.266.000.000,- (100%). Secara rinci realisasi kegiatan Pembuatan Rubuha tersaji pada tabel berikut :

Tabel 21. Realisasi Kegiatan Rubuha

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Rumah Burung Hantu (Rubuha) (Unit)	633	1,266,000,000	633	100.0	1,266,000,000	100.0
	<b>Jumlah</b>	<b>633</b>	<b>1,266,000,000</b>	<b>633</b>	<b>100.0</b>	<b>1,266,000,000</b>	<b>100.0</b>

## 6. Pengujian Mutu Produk

Untuk menjamin kualitas sarana pengendali OPT khususnya pestisida dan menjamin mutu produk tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) melakukan pengujian mutu produk pertanian. Pada Tahun 2021, BPMPT menetapkan target 1.750 Laporan Hasil Pengujian (LHP) dengan anggaran sebesar Rp. 4.025.244.000,-. Realisasi pengujian mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman tahun 2021 telah melebihi target, yaitu sebanyak 2.449 sertifikat LHP atau 139,94% dari target 1.750 LHP. Target pengujian terdiri dari sampel pelanggan (eksternal) sebesar 1.352 dan sampel hasil pemantauan (internal) sebesar 398. Sedangkan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 4.001.667.380,- (99,41%).

## 7. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI)

Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) adalah pemberdayaan petani dalam menerapkan upaya adaptasi menghadapi Dampak Perubahan Iklim (DPI) di lahan usaha taninya, sehingga resiko kerusakan tanaman dapat diminimalkan. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menumbuhkan prakarsa, motivasi dan kemampuan petani untuk menerapkan upaya penanganan DPI
- 2) Mengurangi resiko kehilangan hasil akibat DPI

Luas hamparan pertanaman padi pada setiap unit kegiatan PPDPI yaitu 10 ha dan teknologi yang digunakan berupa biopori atau sumur suntik. Alokasi kegiatan PPDPI pada Tahun 2021 sebanyak 62 unit (620 ha), tersebar di 25 provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.837.978.000,-. Kegiatan PPDPI yang sudah terealisasi sebanyak 620 ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.833.667.000,- (99,8%). Secara rinci realisasi kegiatan PPDPI tersaji pada tabel berikut :

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Penerapan Penanganan DPI

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Penerapan Penanganan DPI (PPDPI) (Ha)	620	2,837,978,000	620	100	2,833,667,000	99.8
	Jumlah	<b>620</b>	<b>2,837,978,000</b>	<b>620</b>	<b>100</b>	<b>2,833,667,000</b>	<b>99.8</b>

## 8. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim bertujuan untuk mengamankan produksi pangan dan sekaligus membantu petani/masyarakat di lingkungan pertanian untuk mengurangi tekanan dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

Padat karya penanganan DPI khususnya kekeringan bertujuan menstimulasi partisipasi aktif petani untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan sarana pompa air dalam upaya penanganan DPI di lahan usaha taninya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk padat karya melibatkan petani/masyarakat sekitar lokasi serta petugas pendamping lapangan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/POPT dan petugas penyuluhan).

Kegiatan ini berupa bantuan biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk pompanisasi saat olah tanah maupun pengawalan *standing crops*, uang

saku/transportasi, dan biaya mobilisasi alsin (pompa air). Alokasi kegiatan pada lokasi yang rawan terkena DPI khususnya kekeringan. Realisasi fisik kegiatan padat karya penanganan DPI seluas 8.882 ha dari target seluas 9.483 ha (93,7%), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.507.438.900,- atau sebesar 93,1% dari target sebesar Rp. 3.768.700.000,-. Realisasi kegiatan gerakan penanganan DPI tidak mencapai 100% karena pada tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemarau basah (kejadian La Nina di awal dan di akhir tahun) sehingga sebagian besar pertanaman masih tercukupi kebutuhan airnya (tidak mengalami kekeringan ekstrem), sehingga beberapa wilayah yang termasuk daerah rawan kekeringan tidak mengalami kekeringan yang signifikan.

Sedangkan untuk kegiatan gerakan penanganan banjir/kekeringan ABT alokasi anggaran sebesar Rp 400.000.000,- untuk areal seluas 1.000 ha. Saat ini, realisasi fisik kegiatan mencapai 1.000 ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 400.000.000,- (100%).

Secara rinci realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Pusat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 23. Realisasi Kegiatan Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan)

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan) (Ha)	9,483	3,768,700,000	8,882	93.7	3,507,438,900	93.1
2	Gerakan penanganan Banjir/kekeringan (ABT) (Ha)	1,000	400,000,000	1,000	100.0	400,000,000	100.0
<b>Jumlah</b>		<b>4,168,700,000</b>		<b>3,907,438,900</b>		<b>93.7</b>	

## 9. Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Kegiatan Dem Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim merupakan suatu metode percontohan penerapan penanganan DPI pada suatu hamparan tanpa batasan wilayah administratif yang bertujuan untuk mengelola pertanaman pangan sehingga aman dari DPI (banjir dan kekeringan). Adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan contoh dan memotivasi petani untuk menerapkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap DPI di lahan usaha taninya, selain itu untuk meminimalkan resiko kehilangan hasil akibat DPI pada tanaman pangan.

Pada tahun 2021, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7.500.000.000,- untuk kegiatan Dem Area Penanganan DPI pada areal seluas 5.000 ha. Sedangkan alokasi kegiatan Dem Area DPI Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 4.650.000.000,- untuk areal seluas 3.100 hektar. Realisasi kegiatan Dem Area DPI tahun 2021 sebesar 5.000 hektar (100%) dengan realisasi anggaran Rp 7.500.000.000,- (100%). Sedangkan untuk Dem Area DPI ABT realisasi anggaran mencapai Rp 4.650.000.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 3.100 (100%). Secara rinci realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Pusat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Kegiatan Dem PDPI

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Dem PDPI (ha)	5,000	7,500,000,000	5,000	100	7,500,000,000	100
2	Dem PDPI (ABT) (ha)	3,100	4,650,000,000	3,100	100	4,650,000,000	100
<b>Jumlah</b>			<b>12,150,000,000</b>			<b>12,150,000,000</b>	<b>100</b>

## 10. Sarana Penanganan DPI

Penanganan kerusakan akibat dampak banjir dan kekeringan pada tanaman pangan juga dilakukan melalui beberapa kegiatan bantuan sarana mitigasi DPI. Bantuan sarana mitigasi DPI terdiri dari pengadaan pompa air sebanyak 715 unit yang terdiri dari pompa air reguler sebanyak 500 unit (Rp. 7.002.919.900,-), pompa air ABT Tahap I sebanyak 215 unit (Rp. 3.899.100.000,-), dan pompa air ABT tahap 2 sebanyak 56 unit (Rp. 700.000.000,-).

Sampai dengan akhir Desember 2021, realisasi kegiatan bantuan pompa mencapai mencapai 100% baik untuk pompa air reguler (500 unit), pompa air ABT Tahap I (215 unit) dan pompa air ABT tahap II (56 unit). Sedangkan untuk realisasi anggaran pompa air reguler sebesar Rp. 7.002.919.900,- (100%), pompa air ABT tahap I Rp 3.899.100.000,- (100%) dan pompa air ABT tahap II sebesar Rp. 686.041.500,- (98%). Sedangkan untuk bantuan sumur bor terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (100%) sebanyak 2 unit (100%). Secara rinci realisasi sarana penanganan DPI tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Realisasi Kegiatan Sarana Penanganan DPI

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Pompa Air (Unit)	500	7,002,920,000	500	100	7,002,919,900	100.0
2	Pompa Air ABT Tahap I (Unit)	215	3,899,154,000	215	100	3,899,100,000	100.0
3	Pompa Air ABT Tahap II (Unit)	56	700,000,000	56	100	686,041,500	98.0
4	Sumur Bor (Unit)	2	100,000,000	2	100	100,000,000	100.0
<b>Jumlah</b>		-	<b>11,702,074,000</b>	-	-	<b>11,688,061,400</b>	<b>99.9</b>

## 11. Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4)

Kegiatan Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4) merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi tentang prinsip dasar PHT, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang teknik budidaya tanaman yang sehat berdasarkan prinsip PHT, meningkatkan keterampilan petugas dan petani untuk dapat menghasilkan, memperbanyak dan mengaplikasikan agens pengendali hayati, pengenalan dan pemanfaatan musuh alami, perangkap hama, pestisida nabati serta tanaman refugia sesuai dengan kondisi serangan OPT dan kebutuhan spesifik lokasi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan P4 antara lain:

- 1) Meningkatkan motivasi, partisipasi dan kemampuan petani dalam melakukan pengelolaan agroekosistem sesuai dengan prinsip dasar PHT.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengembangkan dan mengaplikasikan agens pengendali hayati, pestisida nabati dan/atau pengenalan dan pemanfaatan perangkap hama, dan/atau tanaman refugia di wilayahnya sesuai dengan kondisi serangan OPT dan kebutuhan spesifik lokasi.

Tahapan kegiatan P4 terdiri atas kegiatan persiapan, perencanaan, eksplorasi agens pengendali hayati (APH), Perbanyak APH/Pestisida Nabati/Tanaman Refugia/Tanaman Refugia/Pelestarian Musuh Alami/Pembuatan Perangkap Hama di Tingkat Penerima Bantuan, Aplikasi APH/Pestisida Nabati/Pemasangan Perangkap Hama/Penanaman Tanaman Refugia di Lapangan, dan Evaluasi Pemanfaatan APH/Pestisida Nabati/Pemasangan Perangkap Hama/Penanaman Tanaman Refugia di Lapangan.

Pada tahun 2021, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan P4 sebanyak 120 unit, tersebar di 12 provinsi dengan pagu anggaran

Rp. 3.996.000.000,-. Realisasi kegiatan P4 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 sebanyak 120 unit (100,00%), dengan serapan anggaran Rp.3.987.909.950,- (99,80%).

Anggaran yang tidak terealisasi yaitu Rp8,090,050,- merupakan anggaran konsumsi sebesar Rp8.075.000,- dari pagu anggaran konsumsi Rp240.000.000,- dan anggaran ATK kegiatan/pelaporan Rp15.050,- dari pagu anggaran Rp12.000.000,-. Anggaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan penerimaan kuitansi konsumsi dari daerah melebihi tenggat waktu penyelesaian administrasi kesatkeran.

## **12. Dem Area Budidaya Tanaman Sehat**

Teknik budidaya tanaman sehat selaras dengan prinsip pengendalian berbasis Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang menjadi *flagship* (kegiatan unggulan) di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Penerapan budidaya tanaman sehat diharapkan dapat diadopsi petani dalam skala yang luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan percontohan penerapan budidaya tanaman sehat dalam bentuk Demonstrasi Area (Dem Area) yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti pemberantasan tanah organik, pupuk hayati, dan pestisida biologi.

Kegiatan dilaksanakan di provinsi-provinsi sentra produksi padi untuk mendukung pengamanan produksi dalam rangka pencapaian produksi dan produktivitas padi. Pelaksanaan kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat Padi yang dikelola oleh penerima bantuan dan didampingi oleh petugas pusat dan daerah. Alokasi anggaran kegiatan Dem Area Budidaya Tanaman Sehat pada tahun 2021 mencapai Rp 56.835.300.000,- untuk pelaksanaan kegiatan pada areal seluas 35.610 ha. Realisasi fisik kegiatan Dem Area tahun 2021 mencapai 35.610 ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.716.437.450,- (98,03%).

## **13. Penguatan Sarana Pengendalian OPT (Pengadaan Pusat)**

Pengamanan produksi pangan dari gangguan OPT dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan pengendalian OPT. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang dilaksanakan di Pusat (Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan), maupun di daerah (BPTPH). Kegiatan pengendalian yang dilaksanakan di Pusat antara lain: Kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia padat karya, pengadaan handsprayer, pengadaan drone pengendalian, pengadaan drone pengamatan/pemantauan OPT, pengadaan pestisida, dan pengadaan herbisida.

Pada Tahun 2021 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan bantuan pestisida untuk areal seluas 151.225 ha dengan anggaran sebesar Rp 30.245.000.000,-; handsprayer sebanyak 1.500 unit dengan pagu anggaran sebesar Rp 865.002.000,-; bantuan herbisida untuk areal seluas 4.960 ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp 620.000.000,-.

Realisasi pada tahun 2021 untuk bantuan pestisida yaitu seluas 151.225 ha (100%) dengan realisasi anggaran Rp. 30.244.000.000,- (100%) sedangkan untuk realisasi bantuan handsprayer sebanyak 1.500 unit (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp 863.750.000,- (99,9%). Realisasi pengadaan herbisida mencapai 4.960 ha (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 619.177.000,-. Secara rinci realisasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Pusat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 26. Realisasi Kegiatan Sarana Pengendalian OPT

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Pestisida (Ha)	151,225	30,245,000,000	151,225	100	30,244,000,000	100.0
2	Herbisida (Ha)	4,960	620,000,000	4,960	100	619,177,000	99.9
3	Hand Sprayer (unit)	1,500	865,002,000	1,500	100	863,750,000	99.9
<b>Jumlah</b>			<b>31,730,002,000</b>			<b>31,726,927,000</b>	<b>100.0</b>

## B. Keuangan

Pada Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Satker Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Pusat) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.830.749.000,-. Realisasi Keuangan (SP2D) penggunaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 149.678.696.678,- (97,9%), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 27. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

NO	SUBSTANSI	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			SP2D	
		Rp	Rp	%
		152,830,749,000	149,678,696,678	97.9
1	SUB BAGIAN TATA USAHA	9,437,413,000	8,653,335,637	91.7
2	KELOMPOK SUBSTANSI DATA DAN KELEMBAGAAN POPT	67,943,729,000	66,188,973,936	97.4
	PELAPORAN	166,467,000	165,753,600	99.6
	FUNGSIONAL	102,407,000	98,453,550	96.1
3	KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN OPT SEREALIA	37,119,026,000	36,717,042,075	98.9
	PERENCANAAN	222,124,000	195,130,395	87.8
4	KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN OPT AKABI	5,861,000,000	5,839,841,515	99.6
5	KELOMPOK SUBSTANSI PENANGGULANGAN DPI	27,953,339,000	27,818,498,590	99.5
6	BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN	4,025,244,000	4,001,667,380	99.4

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran DIPA Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

No	Provinsi	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan SP2D	%
	<b>Nasional</b>	<b>117,125,045,000</b>	<b>116,223,356,765</b>	<b>99.23</b>
1	Aceh	5,424,342,000	5,325,212,704	98.17
2	Sumatera Utara	7,578,320,000	7,565,067,525	99.83
3	Sumatera Barat	3,655,549,000	3,629,921,905	99.30
4	Riau	2,247,737,000	2,241,801,112	99.74
5	Jambi	2,268,248,000	2,257,231,200	99.51
6	Sumatera Selatan	5,038,179,000	5,019,481,823	99.63
7	Bengkulu	1,221,108,000	1,220,903,000	99.98
8	Lampung	4,764,692,000	4,747,650,199	99.64
9	Kep. Bangka Belitung	522,022,000	496,802,735	95.17
10	Jawa Barat	9,617,155,000	9,606,972,967	99.89
11	Jawa Tengah	10,058,216,000	10,057,007,279	99.99
12	DI Yogyakarta	1,998,779,000	1,998,704,522	100.00
13	Jawa Timur	11,615,516,000	11,423,156,085	98.34
14	Banten	2,829,794,000	2,796,331,300	98.82
15	Bali	1,411,811,000	1,375,345,531	97.42
16	Nusa Tenggara Barat	2,773,657,000	2,755,895,375	99.36
17	Nusa Tenggara Timur	2,999,550,000	2,982,924,600	99.45
18	Kalimantan Barat	2,544,062,000	2,432,540,160	95.62
19	Kalimantan Tengah	2,419,805,000	2,395,674,550	99.00
20	Kalimantan Selatan	3,933,374,000	3,856,247,400	98.04
21	Kalimantan Timur	2,177,100,000	2,164,113,943	99.40
22	Kalimantan Utara	101,536,000	94,052,000	92.63
23	Sulawesi Utara	3,209,858,000	3,207,789,945	99.94
24	Sulawesi Tengah	3,464,089,000	3,461,706,260	99.93
25	Sulawesi Selatan	8,549,614,000	8,534,137,485	99.82
26	Sulawesi Tenggara	2,867,074,000	2,866,255,000	99.97
27	Gorontalo	2,136,990,000	2,096,692,545	98.11
28	Sulawesi Barat	2,238,494,000	2,215,325,115	98.96
29	Maluku	2,035,675,000	2,035,367,000	99.98
30	Maluku Utara	1,612,176,000	1,611,586,000	99.96
31	Papua Barat	2,019,860,000	2,019,859,500	100.00
32	Papua	1,790,663,000	1,731,600,000	96.70

Data s.d. 21 Januari 2022

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam mencapai output kegiatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK\_ke-i / RVK\_ke-i}{PAK\_ke-i / TVK\_ke-i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

E : Efisiensi

RVK : Realisasi volume keluaran

RAK : Realisasi anggaran per keluaran

TVK : Target volume keluaran

PAK : Pagu anggaran per keluaran

n : Jumlah jenis keluaran

Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal, maka nilai efisiensinya semakin tinggi. Jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien, dan begitu pula sebaliknya. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap capaian output kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 29. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021**

No	Keluaran (output)		Volume keluaran		Anggaran (Rp)		RAK/RVK	PAK/TVK	1-(RAK/RVK)/(PAK/TVK)
	Item keluaran	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)			
1	Penerapan PHT Padi	hektar	3,350	3,325	5,135,600,000	5,112,770,000	1,537,675	1,533,015	-0.30%
2	Penerapan PHT Jagung	hektar	330	330	512,540,000	511,960,000	1,551,394	1,553,152	0.11%
3	Penerapan PHT Kedelai/Kc. Tanah/Kc. Hijau	hektar	285	285	503,210,000	502,759,500	1,764,068	1,765,649	0.09%
4	Penerapan PHT Ubi Kayu	hektar	30	30	52,980,000	52,980,000	1,766,000	1,766,000	0.00%
5	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Pusat	hektar	4,000	4,000	1,800,000,000	1,800,000,000	450,000	450,000	0.00%
6	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Pusat	hektar	1,000	1,000	450,000,000	450,000,000	450,000	450,000	0.00%
7	Gerakan Pengendalian OPT Akabi Dekon	hektar	990	990	442,606,000	440,863,600	445,317	447,077	0.39%
8	Gerakan Pengendalian OPT Serealia Dekon	hektar	29,688	29,688	13,368,600,000	13,349,586,000	449,663	450,303	0.14%
9	Perbanyakkan APH/Refugia	unit	78	78	1,713,905,000	1,713,685,100	21,970,322	21,973,141	0.01%
10	Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH)	unit	62	62	620,000,000	620,000,000	10,000,000	10,000,000	0.00%
11	Rumah Burung Hantu (Rubuha)	unit	633	633	1,266,000,000	1,266,000,000	2,000,000	2,000,000	0.00%
12	Pengujian Mutu Produk	lhp	1,750	2,449	4,025,244,000	4,001,667,380	1,634,001	2,300,139	28.96%
13	Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)	hektar	620	620	2,837,978,000	2,833,667,000	4,570,431	4,577,384	0.15%
14	Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan)	hektar	9,483	8,882	3,768,700,000	3,507,438,900	394,893	397,416	0.63%
15	Gerakan penanganan Banjir/kekeringan (ABT)	hektar	1,000	1,000	400,000,000	400,000,000	400,000	400,000	0.00%
16	Dem PDPI	hektar	5,000	5,000	7,500,000,000	7,500,000,000	1,500,000	1,500,000	0.00%
17	Dem PDPI (ABT)	hektar	3,100	3,100	4,650,000,000	4,650,000,000	1,500,000	1,500,000	0.00%
18	Pompa Air	unit	500	500	7,002,920,000	7,002,919,900	14,005,840	14,005,840	0.00%
19	Pompa Air ABT Tahap I	unit	215	215	3,899,154,000	3,899,100,000	18,135,349	18,135,600	0.00%
20	Pompa Air ABT Tahap II	unit	56	56	700,000,000	686,041,500	12,250,741	12,500,000	1.99%
21	Sumur Bor	unit	2	2	100,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0.00%
22	Pemberdayaan Petani dalam Pemasyaratkan PHT	unit	120	120	3,996,000,000	3,987,909,950	33,232,583	33,300,000	0.20%
23	Dem Area BTS (ABT)	hektar	35,610	35,610	56,835,300,000	55,716,437,450	1,564,629	1,596,049	1.97%
24	Pestisida	hektar	151,225	151,225	30,245,000,000	30,244,000,000	199,993	200,000	0.00%
25	Herbisida	hektar	4,960	4,960	620,000,000	619,177,000			
26	Hand Sprayer	unit	1,500	1,500	865,002,000	863,750,000	575,833	576,668	0.14%
<b>Rata - Rata Efisiensi</b>							<b>Total</b>	<b>34.51%</b>	
							<b>Efisiensi</b>	<b>3.14%</b>	

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya pada semua kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 secara umum sudah efisien karena kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Tahun 2021 memiliki nilai efisiensi positif kecuali untuk PPHT padi. Hal ini disebabkan karena sebanyak 1 unit kegiatan tersebut tidak terlaksana di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana ke rekening kelompok tani sehingga petani tidak bersedia melaksanakan kegiatan dimaksud karena sudah melakukan penanaman sebelum bantuan diterima, Adapun dana bantuan tersebut sudah dikembalikan kepada negara.

## D. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

### 1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun 2021 antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman terhadap Keputusan Menteri Keuangan No. 337/KMK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana PNBP Kementerian Pertanian sehingga menghambat proses penarikan atau pencairan PNBP.
- b. Adanya PPKM mengurangi mobilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya perubahan CPCL menyesuaikan kondisi di lapangan menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat.
- d. Keterlambatan pengiriman bantuan menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan terhambat.
- e. Beragamnya usulan kebutuhan sarana penanganan DPI sesuai kondisi dan ketersediaan air di lapangan, sehingga tidak semua usulan dapat diakomodir/dipenuhi.
- f. Kegiatan padat karya penanganan DPI khususnya kekeringan pada beberapa provinsi dimulai lebih lambat dari yang direncanakan, salah satunya disebabkan oleh belum adanya kekeringan atau ancaman kekeringan pada beberapa wilayah.
- g. Permintaan bantuan rubuha dari daerah belum semua bisa dipenuhi karena adanya pengurangan anggaran untuk membantu penanganan pandemi covid-19.

### 2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan memberikan solusi terhadap permasalahan di atas antara lain :

- a. Terkait dengan adanya penarikan PNBP yang terhambat, dilakukan koordinasi langsung ke Kantor Wilayah KPPN Jakarta 5 untuk mendapatkan penjelasan sehingga kelengkapan administrasi terkait peraturan baru tentang PNBP tersebut dapat segera diselesaikan.
- b. Tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat

- c. Segera mencari CPCL pengganti apabila CPCL awal tidak dapat melaksanakan kegiatan dan mempercepat perbaikan administrasi yang diakibatkan oleh perubahan CPCL tersebut.
- d. Mendorong dinas Provinsi/Kabupaten untuk proaktif terhadap identifikasi kebutuhan yang tepat dalam upaya penanganan DPI di lapangan.
- e. Monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran.
- f. Mendorong agar pembuatan rumah burung hantu dapat dilaksanakan secara swadaya atau menggunakan APBD.

#### **E. Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021**

- 1. Beberapa penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu produk tanaman sehingga jumlah pengujian/sertifikat melebihi target diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a. Terdapat beberapa peralatan dan sarana pendukung laboratorium baru sehingga dapat mempercepat proses pengujian.
  - b. Ruangan laboratorium sudah selesai direnovasi dan alat – alat sudah dikalibrasi sehingga operasional sudah bisa dilakukan sesuai standar.
  - c. BPMPT mengembangkan aplikasi SIJITU (Sistem Informasi Pengujian Mutu) sebagai media pendaftaran pengujian sampai dengan tracking pengujian sampel yang dikirimkan oleh pelanggan. Aplikasi tersebut lebih memudahkan pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung dan sampel juga bisa dikirim melalui ekspedisi/kurir. Selain itu hasil pengujian juga dapat diterima oleh pelanggan melalui aplikasi.
  - d. Pada saat pandemi BPMPT tetap menerima pengujian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan meskipun terbatas dalam penyelesaian sampel pengujian karena terdapat pergantian jadwal WFH dan WFO staf analis.
- 2. Kegiatan P4 dapat terlaksana dengan baik walaupun merupakan pilot project dikarenakan besarnya antusiasme petugas BPTPH Provinsi, LPHP, POPT di lapangan serta petani penerima bantuan dalam menerima pengetahuan dan pemahaman baru tentang tahapan pengembangan APH di lapangan.
- 3. Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPHT, PPDPI Gerdal OPT, Gerakan Penanganan DPI, Dem Area Budidaya Tanaman

Sehat, Dem PDPI dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.

4. Antisipasi dan Mitigasi DPI dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan DPI dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif.
5. Pengamatan dini terhadap serangan OPT dilakukan secara teratur, pengendalian serangan OPT juga dilakukan dengan cepat dan tepat.
6. Tambahan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan berupa ABT.
7. Pada tahun 2021 sebagian besar wilayah Indonesia mengalami kemarau basah (kejadian La Nina di awal dan di akhir tahun) sehingga sebagian besar pertanaman masih tercukupi kebutuhan airnya (tidak mengalami kekeringan ekstrem), sehingga beberapa wilayah yang termasuk daerah rawan kekeringan tidak mengalami kekeringan yang signifikan.

## F. Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

1. Mulai dari awal tahun perhitungan stock bahan yang dibutuhkan dalam pengujian mutu produk tanaman harus segera dilakukan untuk menentukan jumlah kebutuhan bahan yang akan diadakan.
2. Segera menjadwalkan pelaksanaan monitoring terkait pengujian mutu produk apabila anggaran sudah tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
3. Segera memesan barang yang pengadaannya harus *indent* dengan memperhitungkan perkiraan jumlah PNBP yang akan dicapai. Sehingga ketika PNBP sudah memenuhi maksimal pencairan dana, barang yang dibutuhkan untuk pengujian mutu produk sudah tersedia.
4. Penambahan anggaran (untuk pembelian *quechers kit* untuk pengujian residu)
5. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan PPHT Kedelai/Kacang hijau/Kacang tanah dan ubi kayu Anggaran Tahun 2022 yaitu penambahan alokasi anggaran untuk bantuan transportasi petani dan petugas sesuai dengan jumlah anggota poktan/gapoktan dan petugas pendamping. Selain itu, fasilitasi jumlah pertemuan yang hanya 7 kali disesuaikan dengan jumlah pertemuan kelompok yang secara keseluruhan berjumlah 12 kali.

6. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Tahun 2022 yaitu penambahan alokasi kegiatan dan bantuan transportasi yang semula hanya 4 orang per hektar menjadi 10 orang per hektar.
7. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan P4 Tahun 2022 yaitu penambahan alokasi anggaran pengawalan dan pendampingan pemerintah Pusat dan Daerah sehingga tahapan pengembangan APH dapat terlaksana dengan optimal.
8. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan pelayanan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga.
9. Penambahan sarana penunjang (mobil) untuk mobilitas di lapangan.
10. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data khususnya data spasial.
11. Perlu adanya peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam bidang pengendalian/penanganan OPT/DPI berbasis ramah lingkungan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

## **IV. PENUTUP**

Pengukuran capaian kinerja kegiatan perlindungan tanaman pangan tahun 2021 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan capaian kinerja sebesar 122,2%. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator OPT/DPI berturut-turut sebesar 131,53% dan 131,00%. Keberhasilan dalam pengamanan areal pertanaman tanaman pangan tersebut juga dapat menjadi indikator adanya manfaat dari kegiatan pengamatan, pencegahan dan pengendalian serangan OPT/DPI yang telah dilakukan. Keberhasilan lain juga terlihat dari indikator kinerja pada aspek pelayanan yaitu capaian jumlah sertifikasi hasil uji mutu sebesar 139,94%, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik BPMPT sebesar 100,06% dan tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga sebesar 105,63%.

Keberhasilan ini dicapai dengan dukungan anggaran pusat sebesar Rp. 152,830,749,000,-, dengan realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 149.678.696.678,- (97,9%). Selain itu juga ada dukungan anggaran Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 117,125,045,000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp 116.223.356.765,- atau sebesar 99,23%. Sementara itu, penggunaan sumberdaya pada semua kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 secara umum sudah efisien karena rata-rata angka efisiensi kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2021 memiliki nilai positif.

Keberhasilan pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI juga tidak terlepas dari peran seluruh petugas dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap para petani dalam hal prinsip budidaya tanaman sehat, pengelolaan hama terpadu dan respon cepat dalam penanggulangan dampak perubahan iklim yang terjadi di lapangan. Selain itu, kelembagaan perlindungan turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan. Laboratorium pengujian mutu produk juga berperan dalam memastikan sarana pengendali OPT yang tersedia selalu terjamin mutu dan efektifitasnya.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain pelaksanaan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat mengingat sampai saat ini pandemi covid-19 masih berlangsung; mendorong dinas Provinsi/Kabupaten untuk proaktif terhadap identifikasi kebutuhan yang tepat dalam upaya penanganan

OPT/DPI di lapangan; melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengendalian OPT dan penerapan sistem PHT baik kepada petani maupun petugas di lapangan.

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1.****LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN PADI****Oktober 2020 – September 2021***Ha*

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	9,397	17	9,380	99.82
2	Sumatera Utara	12,593	43	12,550	99.66
3	Sumatera Barat	2,819	124	2,695	95.61
4	Riau	3,875	3	3,872	99.93
5	Jambi	2,097	118	1,979	94.40
6	Sumatera Selatan	14,379	228	14,150	98.41
7	Bengkulu	3,500	39	3,462	98.90
8	Lampung	33,768	420	33,348	98.76
9	Kep. Bangka Belitung	1,176	69	1,107	94.12
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	210	-	210	100.00
12	Jawa Barat	62,221	190	62,031	99.69
13	Jawa Tengah	45,216	780	44,435	98.27
14	DI Yogyakarta	5,255	5	5,250	99.90
15	Jawa Timur	31,655	667	30,988	97.89
16	Banten	8,313	60	8,254	99.28
17	Bali	5,485	548	4,937	90.01
18	Nusa Tenggara Barat	8,335	-	8,335	100.00
19	Nusa Tenggara Timur	2,910	71	2,840	97.58
20	Kalimantan Barat	7,739	25	7,714	99.68
21	Kalimantan Tengah	1,728	0	1,728	99.98
22	Kalimantan Selatan	1,318	131	1,187	90.04
23	Kalimantan Timur	8,291	16	8,275	99.81
24	Kalimantan Utara	110	-	110	100.00
25	Sulawesi Utara	1,985	-	1,985	100.00
26	Sulawesi Tengah	13,440	44	13,396	99.67
27	Sulawesi Selatan	21,215	342	20,873	98.39
28	Sulawesi Tenggara	20,313	252	20,061	98.76
29	Gorontalo	3,606	22	3,585	99.40
30	Sulawesi Barat	6,938	39	6,898	99.43
31	Maluku	4,557	3	4,554	99.95
32	Maluku Utara	1,113	-	1,113	100.00
33	Papua Barat	1,139	4	1,135	99.65
34	Papua	1,870	213	1,657	88.63
<b>Jumlah</b>		<b>348,563</b>	<b>4,470</b>	<b>344,093</b>	<b>98.72</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 2.****LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN JAGUNG****Oktober 2020 – September 2021**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	3,257	-	3,257	100.00
2	Sumatera Utara	5,264	-	5,264	100.00
3	Sumatera Barat	283	-	283	100.00
4	Riau	616	-	616	100.00
5	Jambi	289	-	289	100.00
6	Sumatera Selatan	2,601	2	2,599	99.94
7	Bengkulu	509	-	509	100.00
8	Lampung	9,057	9	9,048	99.91
9	Kep. Bangka Belitung	9	-	9	100.00
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1,609	-	1,609	100.00
13	Jawa Tengah	6,713	9	6,704	99.87
14	DI Yogyakarta	431	1	430	99.77
15	Jawa Timur	4,999	21	4,978	99.58
16	Banten	478	-	478	100.00
17	Bali	237	-	237	100.00
18	Nusa Tenggara Barat	4,224	33	4,191	99.22
19	Nusa Tenggara Timur	3,209	8	3,201	99.75
20	Kalimantan Barat	1,397	1	1,397	99.96
21	Kalimantan Tengah	126	-	126	100.00
22	Kalimantan Selatan	134	4	130	97.02
23	Kalimantan Timur	2,005	-	2,005	100.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	2,588	-	2,588	100.00
26	Sulawesi Tengah	7,247	-	7,247	100.00
27	Sulawesi Selatan	5,405	8	5,397	99.85
28	Sulawesi Tenggara	2,977	-	2,977	100.00
29	Gorontalo	7,762	4	7,759	99.95
30	Sulawesi Barat	3,105	-	3,105	100.00
31	Maluku	42	-	42	100.00
32	Maluku Utara	216	11	205	94.85
33	Papua Barat	145	-	145	100.00
34	Papua	847	53	794	93.74
<b>Jumlah</b>		<b>77,781</b>	<b>162</b>	<b>77,619</b>	<b>99.79</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 3.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KEDELAI**  
**Oktober 2020 – September 2021**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	22	-	22	100.00
2	Sumatera Utara	5	-	5	100.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	11	-	11	100.00
5	Jambi	10	-	10	100.00
6	Sumatera Selatan	1	-	1	100.00
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	8	-	8	100.00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	68	4	64	94.12
13	Jawa Tengah	298	50	248	83.25
14	DI Yogyakarta	46	2	44	95.64
15	Jawa Timur	364	-	364	100.00
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	7	-	7	100.00
18	Nusa Tenggara Barat	206	-	206	100.00
19	Nusa Tenggara Timur	23	-	23	100.00
20	Kalimantan Barat	30	-	30	100.00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	3	-	3	100.00
23	Kalimantan Timur	0	-	0	100.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	10	-	10	100.00
26	Sulawesi Tengah	110	-	110	100.00
27	Sulawesi Selatan	2	-	2	100.00
28	Sulawesi Tenggara	20	-	20	100.00
29	Gorontalo	16	-	16	100.00
30	Sulawesi Barat	49	-	49	100.00
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	1	-	1	100.00
34	Papua	1	-	1	100.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,310</b>	<b>56</b>	<b>1,254</b>	<b>95.73</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 4.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KACANG TANAH**  
**Oktober 2020 – September 2021**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	55	-	55	100.00
2	Sumatera Utara	127	-	127	100.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	12	-	12	100.00
5	Jambi	11	-	11	100.00
6	Sumatera Selatan	17	-	17	100.00
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	9	-	9	100.00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14	-	14	100.00
13	Jawa Tengah	58	-	58	100.00
14	DI Yogyakarta	46	1	45	97.81
15	Jawa Timur	561	-	561	100.00
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	1	-	1	100.00
18	Nusa Tenggara Barat	65	4	61	93.85
19	Nusa Tenggara Timur	4	-	4	100.00
20	Kalimantan Barat	29	-	29	100.00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	1	-	1	100.00
23	Kalimantan Timur	0	-	0	100.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	180	-	180	100.00
26	Sulawesi Tengah	196	-	196	100.00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	38	-	38	100.00
29	Gorontalo	38	-	38	100.00
30	Sulawesi Barat	13	-	13	100.00
31	Maluku	4	-	4	100.00
32	Maluku Utara	3	-	3	100.00
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	13	0	13	97.39
<b>Jumlah</b>		<b>1,494</b>	<b>5</b>	<b>1,489</b>	<b>99.64</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 5.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KACANG HIJAU**  
**Oktober 2020 – September 2021**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1	-	1	100.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	4	-	4	100.00
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	15	3	12	80.00
13	Jawa Tengah	248	-	248	100.00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	136	23	113	83.10
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	9	-	9	100.00
19	Nusa Tenggara Timur	25	-	25	100.00
20	Kalimantan Barat	2	-	2	100.00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	14	-	14	100.00
28	Sulawesi Tenggara	25	-	25	100.00
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	7	-	7	100.00
31	Maluku	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>484</b>	-	<b>484</b>	<b>100.00</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 6.**

**LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN UBI KAYU**  
**Oktober 2020 – September 2021**

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	47	-	47	100.00
2	Sumatera Utara	260	-	260	100.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	134	-	134	100.00
5	Jambi	12	0	12	96.21
6	Sumatera Selatan	5	-	5	100.00
7	Bengkulu	17	-	17	100.00
8	Lampung	27	-	27	100.00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	85	-	85	100.00
13	Jawa Tengah	26	-	26	100.00
14	DI Yogyakarta	4	1	3	77.53
15	Jawa Timur	279	-	279	100.00
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	67	-	67	100.00
20	Kalimantan Barat	61	-	61	100.00
21	Kalimantan Tengah	1	-	1	100.00
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	30	-	30	100.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	405	-	405	100.00
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	6	-	6	100.00
28	Sulawesi Tenggara	230	-	230	100.00
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	35	-	35	100.00
31	Maluku	75	-	75	100.00
32	Maluku Utara	13	-	13	100.00
33	Papua Barat	6	-	6	100.00
34	Papua	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1,823</b>	<b>1</b>	<b>1,822</b>	<b>99.92</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 7.****LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN UBI JALAR****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	14	-	14	100.00
2	Sumatera Utara	6	-	6	100.00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-
4	Riau	2	-	2	100.00
5	Jambi	7	-	7	100.00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-
12	Jawa Barat	3	-	3	100.00
13	Jawa Tengah	20	-	20	100.00
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-
15	Jawa Timur	7	-	7	100.00
16	Banten	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	2	-	2	100.00
20	Kalimantan Barat	17	-	17	100.00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	1	-	1	100.00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	258	-	258	100.00
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	63	-	63	100.00
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	36	-	36	100.00
31	Maluku	5	-	5	100.00
32	Maluku Utara	-	-	-	-
33	Papua Barat	15	-	15	100.00
34	Papua	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>454</b>	-	<b>454</b>	<b>100.00</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 8.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN PADI****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	27,743	6,068	21,675	78.13	5,527	732	4,795	86.75
2	Sumatera Utara	16,895	5,466	11,429	67.65	511	45	466	91.18
3	Sumatera Barat	474	47	427	90.13	364	5	359	98.67
4	Riau	5,970	400	5,570	93.30	446	2	444	99.55
5	Jambi	9,599	1,978	7,622	79.40	372	-	372	100.00
6	Sumatera Selatan	2,770	90	2,680	96.75	40	-	40	100.00
7	Bengkulu	198	91	108	54.29	-	-	-	-
8	Lampung	6,888	2,677	4,211	61.14	1,392	213	1,179	84.68
9	Kep. Bangka Belitung	66	-	66	100.00	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	78,200	12,899	65,302	83.51	17,727	2,772	14,955	84.36
13	Jawa Tengah	45,660	12,875	32,786	71.80	6,165	381	5,784	93.82
14	DI Yogyakarta	347	-	347	100.00	160	36	124	77.73
15	Jawa Timur	19,931	3,404	16,527	82.92	9,238	323	8,916	96.51
16	Banten	11,679	2,118	9,562	81.87	4,951	376	4,575	92.41
17	Bali	123	-	123	100.00	174	1	173	99.71
18	Nusa Tenggara Barat	913	87	826	90.52	635	70	565	89.05
19	Nusa Tenggara Timur	11,432	786	10,646	93.13	12	7	5	41.67
20	Kalimantan Barat	5,388	360	5,028	93.31	2,028	7	2,022	99.68
21	Kalimantan Tengah	10,006	3,799	6,207	62.03	36	-	36	100.00
22	Kalimantan Selatan	48,522	9,763	38,759	79.88	77	-	77	100.00
23	Kalimantan Timur	1,358	22	1,335	98.36	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	313	0	313	99.92	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	1,334	44	1,290	96.69	90	-	90	100.00
27	Sulawesi Selatan	51,265	17,195	34,070	66.46	2,096	328	1,768	84.35
28	Sulawesi Tenggara	2,759	576	2,183	79.12	1,193	-	1,193	100.00
29	Gorontalo	929	183	746	80.28	96	-	96	100.00
30	Sulawesi Barat	100	-	100	100.00	36	-	36	100.00
31	Maluku	36	17	19	52.78	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>360,897</b>	<b>80,945</b>	<b>279,952</b>	<b>77.57</b>	<b>53,366</b>	<b>5,296</b>	<b>48,070</b>	<b>90.08</b>

Ket : T = Terkena; P = Puso

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 9.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN JAGUNG****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	1,076	517	559	51.95	4	-	4	100.00
2	Sumatera Utara	1,267	194	1,073	84.68	4,553	18	4,535	99.60
3	Sumatera Barat	33	32	1	2.71	1	-	1	100.00
4	Riau	10	5	5	50.20	-	-	-	-
5	Jambi	226	123	103	45.74	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	195	84	111	56.81	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	101	-	101	100.00
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	1,157	-	1,157	100.00
13	Jawa Tengah	2,414	1,237	1,177	48.77	124	-	124	100.00
14	DI Yogyakarta	67	-	67	100.00	-	-	-	-
15	Jawa Timur	1,336	414	922	69.01	124	-	124	100.00
16	Banten	5	5	-	-	-	-	-	-
17	Bali	61	9	52	85.25	435	-	435	100.00
18	Nusa Tenggara Barat	379	41	338	89.18	334	-	334	100.00
19	Nusa Tenggara Timur	8,325	862	7,463	89.64	130	-	130	100.00
20	Kalimantan Barat	132	30	102	77.28	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	30	21	9	31.21	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	593	73	520	87.69	526	-	526	100.00
23	Kalimantan Timur	2	2	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	93	-	93	100.00	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	79	3	76	96.02	30	-	30	100.00
27	Sulawesi Selatan	3,995	1,594	2,401	60.10	41	20	21	51.85
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	356	33	324	90.84	188	176	12	6.52
30	Sulawesi Barat	210	83	127	60.55	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20,883</b>	<b>5,360</b>	<b>15,522</b>	<b>74.33</b>	<b>7,747</b>	<b>213</b>	<b>7,534</b>	<b>97.25</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 10.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KEDELAI****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	5	5	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	22	22	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	0	-	0	100.00	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	64	41	23	35.94	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	1,370	262	1,108	80.88	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	1	-	1	100.00	-	-	-	-
16	Banten	780	731	49	6.28	-	-	-	-
17	Bali	60	-	60	100.00	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	15	-	15	100.00
19	Nusa Tenggara Timur	165	-	165	100.00	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	2	-	2	100.00	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	73	-	73	100.00
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2,468</b>	<b>1,061</b>	<b>1,408</b>	<b>57.03</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>100.00</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 11.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KACANG TANAH****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	2	-	2	100.00	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	7	5	2	30.77	-	-	-	-
4	Riau	2	-	2	100.00	-	-	-	-
5	Jambi	23	7	16	70.80	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4	4	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	50	50	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	1	-	1	100.00	-	-	-	-
15	Jawa Timur	69	62	7	10.14	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	312	8	304	97.44	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	5	-	5	100.00	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>474</b>	<b>135</b>	<b>339</b>	<b>71.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 12.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KACANG HIJAU****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Percentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1	-	1	100.00	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	3,961	2,346	1,615	40.77	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	1,145	2	1,143	99.83	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>5,107</b>	<b>2,348</b>	<b>2,759</b>	<b>54.02</b>	-	-	-	-

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 13.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN UBI KAYU****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	2	1	1	57.14	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	0	-	0	100.00	-	-	-	-
5	Jambi	5	1	4	89.58	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	256	48	208	81.38	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	12	-	12	100.00	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>275</b>	<b>49</b>	<b>226</b>	<b>82.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 14.****LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN UBI JALAR****Oktober 2020 – September 2021****ha**

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	0	0	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	58	-	58	100.00	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>99.49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Data periode laporan 14 Januari 2022

**Lampiran 15.****Realisasi Kegiatan PPHT Padi Tahun 2021****ha**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	100	153,000,000	100	100.0	153,000,000	100.0
2	Sumatera Utara	225	344,250,000	225	100.0	344,250,000	100.0
3	Sumatera Barat	125	191,250,000	125	100.0	191,250,000	100.0
4	Riau	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
5	Jambi	50	76,500,000	50	100.0	76,500,000	100.0
6	Sumatera Selatan	200	306,000,000	200	100.0	306,000,000	100.0
7	Bengkulu	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
8	Lampung	150	229,500,000	150	100.0	229,500,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	400	605,600,000	400	100.0	601,550,000	99.3
13	Jawa Tengah	400	612,000,000	400	100.0	612,000,000	100.0
14	DI Yogyakarta	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
15	Jawa Timur	375	573,750,000	375	100.0	573,570,000	100.0
16	Banten	75	132,450,000	75	100.0	132,450,000	100.0
17	Bali	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
18	Nusa Tenggara Barat	75	114,750,000	75	100.0	114,750,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	75	114,750,000	75	100.0	114,750,000	100.0
20	Kalimantan Barat	150	229,500,000	150	100.0	229,500,000	100.0
21	Kalimantan Tengah	50	76,500,000	50	100.0	76,500,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	150	229,500,000	150	100.0	229,500,000	100.0
23	Kalimantan Timur	25	38,250,000	25	100.0	38,150,000	99.7
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	50	76,500,000	50	100.0	76,500,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	50	76,500,000	50	100.0	76,500,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	250	382,500,000	250	100.0	376,700,000	98.5
28	Sulawesi Tenggara	50	76,500,000	50	100.0	76,300,000	99.7
29	Gorontalo	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
30	Sulawesi Barat	50	76,500,000	50	100.0	76,500,000	100.0
31	Maluku	50	76,500,000	50	100.0	76,500,000	100.0
32	Maluku Utara	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
33	Papua Barat	25	38,250,000	25	100.0	38,250,000	100.0
34	Papua	25	37,050,000		-	24,550,000	66.3
<b>Jumlah</b>		<b>3,350</b>	<b>5,135,600,000</b>	<b>3,325</b>	<b>99.3</b>	<b>5,112,770,000</b>	<b>99.6</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 16.****Realisasi Kegiatan Penerapan PHT Jagung Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
2	Sumatera Utara	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
3	Sumatera Barat	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	30	45,900,000	30	100	45,900,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
13	Jawa Tengah	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
14	DI Yogyakarta	15	26,490,000	15	100	26,490,000	100.0
15	Jawa Timur	60	91,800,000	60	100	91,480,000	99.7
16	Banten	15	26,490,000	15	100	26,490,000	100.0
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	15	23,510,000	15	100	23,510,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	30	45,900,000	30	100	45,770,000	99.7
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	15	22,950,000	15	100	22,950,000	100.0
30	Sulawesi Barat	15	22,950,000	15	100	22,820,000	99.4
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>330</b>	<b>512,540,000</b>	<b>330</b>	<b>100</b>	<b>511,960,000</b>	<b>99.9</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 17.****Realisasi Kegiatan Penerapan PHT Kedelai /Kacang Tanah/Kacang Hijau Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	25	44,150,000	25	100	44,150,000	100.0
2	Sumatera Utara	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100.0
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100.0
6	Sumatera Selatan	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100.0
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	30	52,980,000	30	100	52,980,000	100.0
13	Jawa Tengah	30	52,980,000	30	100	52,980,000	100.0
14	DI Yogyakarta	15	26,490,000	15	100	26,490,000	100.0
15	Jawa Timur	15	26,490,000	15	100	26,040,000	98.3
16	Banten	15	26,490,000	15	100	26,490,000	100.0
17	Bali	15	26,490,000	15	100	26,490,000	100.0
18	Nusa Tenggara Barat	25	44,150,000	25	100	44,150,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	15	26,490,000	15	100	26,490,000	100.0
20	Kalimantan Barat	5	8,830,000	5	100	8,830,000	100.0
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	5	8,830,000	5	100	8,829,500	100.0
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	5	8,830,000	5	100	8,830,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	20	35,320,000	20	100	35,320,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara	5	8,730,000	5	100	8,730,000	100.0
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100.0
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>285</b>	<b>503,210,000</b>	<b>285</b>	<b>100</b>	<b>502,759,500</b>	<b>99.9</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 18.****Realisasi Kegiatan Penerapan PHT Ubi Kayu Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	10	17,660,000	10	100	17,660,000	100
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	5	8,830,000	5	100	8,830,000	100
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	5	8,830,000	5	100	8,830,000	100
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>52,980,000</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>52,980,000</b>	<b>100</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 19.****Realisasi Kegiatan Perbanyakkan APH/Refugia Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
2	Sumatera Utara	4	60,000,000	4	100	60,000,000	100.0
3	Sumatera Barat	1	25,000,000	1	100	24,986,000	99.9
4	Riau	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
5	Jambi	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
6	Sumatera Selatan	4	100,000,000	4	100	100,000,000	100.0
7	Bengkulu	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
8	Lampung	3	75,000,000	3	100	75,000,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	15	225,000,000	15	100	225,000,000	100.0
13	Jawa Tengah	7	175,000,000	7	100	174,994,500	100.0
14	DI Yogyakarta	1	24,905,000	1	100	24,905,000	100.0
15	Jawa Timur	7	175,000,000	7	100	174,993,500	100.0
16	Banten	2	50,000,000	2	100	50,000,000	100.0
17	Bali	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
18	Nusa Tenggara Barat	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
20	Kalimantan Barat	1	25,000,000	1	100	24,836,500	99.3
21	Kalimantan Tengah	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	2	50,000,000	2	100	49,985,000	100.0
23	Kalimantan Timur	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	2	50,000,000	2	100	50,000,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	2	34,000,000	2	100	34,000,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	5	100,000,000	5	100	100,000,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara	3	75,000,000	3	100	75,000,000	100.0
29	Gorontalo	2	50,000,000	2	100	49,984,600	100.0
30	Sulawesi Barat	3	75,000,000	3	100	75,000,000	100.0
31	Maluku	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
32	Maluku Utara	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
33	Papua Barat	1	25,000,000	1	100	25,000,000	100.0
34	Papua	1	20,000,000	1	100	20,000,000	100.0
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>1,713,905,000</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>1,713,685,100</b>	<b>100.0</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 20.****Realisasi Kegiatan Rumah Burung Hantu Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	58	116,000,000	58	100	116,000,000	100.0
2	Sumatera Utara	40	80,000,000	40	100	80,000,000	100.0
3	Sumatera Barat	20	40,000,000	20	100	40,000,000	100.0
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	10	20,000,000	10	100	20,000,000	100.0
6	Sumatera Selatan	80	160,000,000	80	100	160,000,000	100.0
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	40	80,000,000	40	100	80,000,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	60	120,000,000	60	100	120,000,000	100.0
13	Jawa Tengah	131	262,000,000	131	100	262,000,000	100.0
14	DI Yogyakarta	15	30,000,000	15	100	30,000,000	100.0
15	Jawa Timur	55	110,000,000	55	100	110,000,000	100.0
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	20	40,000,000	20	100	40,000,000	100.0
18	Nusa Tenggara Barat	10	20,000,000	10	100	20,000,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	10	20,000,000	10	100	20,000,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	4	8,000,000	4	100	8,000,000	100.0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	20	40,000,000	20	100	40,000,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	60	120,000,000	60	100	120,000,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>633</b>	<b>1,266,000,000</b>	<b>633</b>	<b>100</b>	<b>1,266,000,000</b>	<b>100.0</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 21.****Realisasi Kegiatan Pos Pelayanan Agens Hayati Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
2	Sumatera Utara	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
3	Sumatera Barat	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
4	Riau	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
5	Jambi	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
6	Sumatera Selatan	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
7	Bengkulu	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
8	Lampung	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	9	90,000,000	9	100	90,000,000	100.0
13	Jawa Tengah	10	100,000,000	10	100	100,000,000	100.0
14	DI Yogyakarta	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
15	Jawa Timur	9	90,000,000	9	100	90,000,000	100.0
16	Banten	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
17	Bali	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
18	Nusa Tenggara Barat	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
23	Kalimantan Timur	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	3	30,000,000	3	100	30,000,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	2	20,000,000	2	100	20,000,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	5	50,000,000	5	100	50,000,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	1	10,000,000	1	100	10,000,000	100.0
34	Papua	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>620,000,000</b>	<b>62</b>	<b>100</b>	<b>620,000,000</b>	<b>100.0</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 22.****Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Padat Karya Pusat  
Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	50	22,500,000	50	100	22,500,000	100.0
3	Sumatera Barat	50	22,500,000	50	100	22,500,000	100.0
4	Riau	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	30	13,500,000	30	100	13,500,000	100.0
6	Sumatera Selatan	50	22,500,000	50	100	22,500,000	100.0
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	100	45,000,000	100	100	45,000,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	100	45,000,000	100	100	45,000,000	100.0
13	Jawa Tengah	180	81,000,000	180	100	81,000,000	100.0
14	DI Yogyakarta	80	36,000,000	80	100	36,000,000	100.0
15	Jawa Timur	60	27,000,000	60	100	27,000,000	100.0
16	Banten	-	-	-	-	-	-
17	Bali	20	9,000,000	20	100	9,000,000	100.0
18	Nusa Tenggara Barat	50	22,500,000	50	100	22,500,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	30	13,500,000	30	100	13,500,000	100.0
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	50	22,500,000	50	100	22,500,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	50	22,500,000	50	100	22,500,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	100	45,000,000	100	100	45,000,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>1,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100</b>	<b>450,000,000</b>	<b>100.0</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 23.****Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Dekon Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi		
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)
1	Aceh	75	33,750,000	75	100	33,750,000
2	Sumatera Utara	20	9,000,000	20	100	9,000,000
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	20	6,600,000	20	100	6,600,000
5	Jambi	20	9,000,000	20	100	9,000,000
6	Sumatera Selatan	70	31,500,000	70	100	31,477,600
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	25	11,250,000	25	100	11,250,000
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau				-	-
11	DKI Jakarta				-	-
12	Jawa Barat	100	45,000,000	100	100	45,000,000
13	Jawa Tengah	130	58,006,000	130	100	58,006,000
14	DI Yogyakarta	30	13,500,000	30	100	13,500,000
15	Jawa Timur	95	42,750,000	95	100	41,030,000
16	Banten	48	21,600,000	48	100	21,600,000
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	40	18,000,000	40	100	18,000,000
19	Nusa Tenggara Timur	20	9,000,000	20	100	9,000,000
20	Kalimantan Barat	13	5,850,000	13	100	5,850,000
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	10	4,500,000	10	100	4,500,000
23	Kalimantan Timur	20	9,000,000	20	100	9,000,000
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	20	9,000,000	20	100	9,000,000
26	Sulawesi Tengah	20	9,000,000	20	100	9,000,000
27	Sulawesi Selatan	100	45,000,000	100	100	45,000,000
28	Sulawesi Tenggara	20	9,000,000	20	100	9,000,000
29	Gorontalo	20	9,000,000	20	100	9,000,000
30	Sulawesi Barat	20	9,000,000	20	100	9,000,000
31	Maluku	25	11,250,000	25	100	11,250,000
32	Maluku Utara	15	6,750,000	15	100	6,750,000
33	Papua Barat	14	6,300,000	14	100	6,300,000
34	Papua				-	-
<b>Jumlah</b>		<b>990</b>	<b>442,606,000</b>	<b>990</b>	<b>100</b>	<b>440,863,600</b>
						<b>99.6</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 24.****Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Padat Karya Pusat Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	150	67,500,000	150	100	67,500,000	100.0
2	Sumatera Utara	150	67,500,000	150	100	67,500,000	100.0
3	Sumatera Barat	120	54,000,000	120	100	54,000,000	100.0
4	Riau		-		-		-
5	Jambi		-		-		-
6	Sumatera Selatan	220	99,000,000	220	100	99,000,000	100.0
7	Bengkulu		-		-		-
8	Lampung	350	157,500,000	350	100	157,500,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung		-		-		-
10	Kep. Riau		-		-		-
11	DKI Jakarta		-		-		-
12	Jawa Barat	450	202,500,000	450	100	202,500,000	100.0
13	Jawa Tengah	550	247,500,000	550	100	247,500,000	100.0
14	DI Yogyakarta		-		-		-
15	Jawa Timur	250	112,500,000	250	100	112,500,000	100.0
16	Banten	120	54,000,000	120	100	54,000,000	100.0
17	Bali		-		-		-
18	Nusa Tenggara Barat	120	54,000,000	120	100	54,000,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur		-		-		-
20	Kalimantan Barat		-		-		-
21	Kalimantan Tengah	120	54,000,000	120	100	54,000,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	120	54,000,000	120	100	54,000,000	100.0
23	Kalimantan Timur		-		-		-
24	Kalimantan Utara		-		-		-
25	Sulawesi Utara		-		-		-
26	Sulawesi Tengah		-		-		-
27	Sulawesi Selatan	150	67,500,000	150	100	67,500,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara		-		-		-
29	Gorontalo		-		-		-
30	Sulawesi Barat	130	58,500,000	130	100	58,500,000	100.0
31	Maluku		-		-		-
32	Maluku Utara		-		-		-
33	Papua Barat		-		-		-
34	Papua		-		-		-
35	Pusat	1,000	450,000,000	1,000		450,000,000	
<b>Jumlah</b>		<b>4,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>4,000</b>	<b>100</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>100.0</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 25.**

**Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Pakar Dekon  
Tahun 2021**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	850	382,500,000	850	100	382,500,000	100.0
2	Sumatera Utara	1,720	783,000,000	1,720	100	779,400,000	99.5
3	Sumatera Barat	934	420,300,000	934	100	420,300,000	100.0
4	Riau	270	121,500,000	270	100	121,500,000	100.0
5	Jambi	290	130,500,000	290	100	130,500,000	100.0
6	Sumatera Selatan	1,700	765,000,000	1,700	100	764,456,000	99.9
7	Bengkulu	365	164,250,000	365	100	164,250,000	100.0
8	Lampung	1,900	855,000,000	1,900	100	855,000,000	100.0
9	Kep. Bangka Belitung	90	40,500,000	90	100	40,500,000	100.0
10	Kep. Riau				-		-
11	DKI Jakarta				-		-
12	Jawa Barat	3,400	1,530,000,000	3,400	100	1,530,000,000	100.0
13	Jawa Tengah	3,500	1,575,000,000	3,500	100	1,561,700,000	99.2
14	DI Yogyakarta	590	265,500,000	590	100	265,500,000	100.0
15	Jawa Timur	3,550	1,597,500,000	3,550	100	1,597,500,000	100.0
16	Banten	1,100	495,000,000	1,100	100	495,000,000	100.0
17	Bali	400	180,000,000	400	100	178,560,000	99.2
18	Nusa Tenggara Barat	800	360,000,000	800	100	360,000,000	100.0
19	Nusa Tenggara Timur	750	337,500,000	750	100	337,500,000	100.0
20	Kalimantan Barat	850	382,500,000	850	100	382,500,000	100.0
21	Kalimantan Tengah	360	162,000,000	360	100	162,000,000	100.0
22	Kalimantan Selatan	850	382,500,000	850	100	382,500,000	100.0
23	Kalimantan Timur	330	148,500,000	330	100	148,370,000	99.9
24	Kalimantan Utara	50	22,500,000	50	-	22,500,000	-
25	Sulawesi Utara	750	337,500,000	750	100	337,500,000	100.0
26	Sulawesi Tengah	500	225,000,000	500	100	225,000,000	100.0
27	Sulawesi Selatan	1,800	810,000,000	1,800	100	810,000,000	100.0
28	Sulawesi Tenggara	420	189,000,000	420	100	189,000,000	100.0
29	Gorontalo	450	202,500,000	450	100	202,500,000	100.0
30	Sulawesi Barat	410	184,500,000	410	100	184,500,000	100.0
31	Maluku	319	143,550,000	319	100	143,550,000	100.0
32	Maluku Utara	170	76,500,000	170	100	76,500,000	100.0
33	Papua Barat	60	27,000,000	60	100	27,000,000	100.0
34	Papua	160	72,000,000	160	100	72,000,000	100.0
<b>Jumlah</b>		<b>29,688</b>	<b>13,368,600,000</b>	<b>29,688</b>	<b>100</b>	<b>13,349,586,000</b>	<b>99.9</b>

Update data 21 Januari 2022

**Lampiran 26.****Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Petani Dalam Pemasyarakatan PHT (P4)  
Tahun 2021**

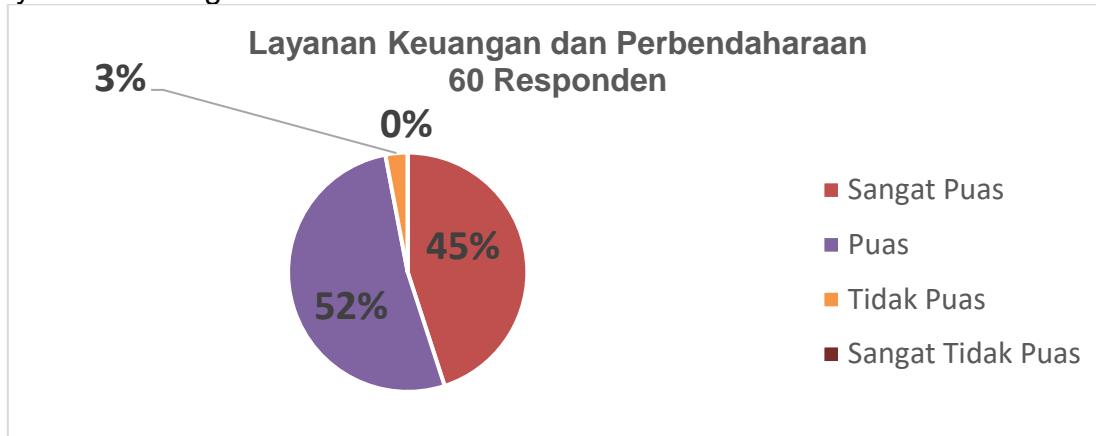
No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	5	166,500,000	5	100	156,000,000	93.7
2	Sumatera Utara	10	333,000,000	10	100	312,000,000	93.7
3	Sumatera Barat		-		-		-
4	Riau		-		-		-
5	Jambi		-		-		-
6	Sumatera Selatan	10	333,000,000	10	100	312,000,000	93.7
7	Bengkulu		-		-		-
8	Lampung	10	333,000,000	10	100	312,000,000	93.7
9	Kep. Bangka Belitung		-		-		-
10	Kep. Riau		-		-		-
11	DKI Jakarta		-		-		-
12	Jawa Barat	20	666,000,000	20	100	624,000,000	93.7
13	Jawa Tengah	20	666,000,000	20	100	624,000,000	93.7
14	DI Yogyakarta		-		-		-
15	Jawa Timur	20	666,000,000	20	100	624,000,000	93.7
16	Banten		-		-		-
17	Bali		-		-		-
18	Nusa Tenggara Barat	5	166,500,000	5	100	156,000,000	93.7
19	Nusa Tenggara Timur	2	66,600,000	2	100	62,400,000	93.7
20	Kalimantan Barat		-		-		-
21	Kalimantan Tengah	3	99,900,000	3	100	93,600,000	93.7
22	Kalimantan Selatan	3	99,900,000	3	100	93,600,000	93.7
23	Kalimantan Timur		-		-		-
24	Kalimantan Utara		-		-		-
25	Sulawesi Utara		-		-		-
26	Sulawesi Tengah		-		-		-
27	Sulawesi Selatan	12	399,600,000	12	100	374,400,000	93.7
28	Sulawesi Tenggara				-		-
29	Gorontalo				-		-
30	Sulawesi Barat				-		-
31	Maluku				-		-
32	Maluku Utara				-		-
33	Papua Barat				-		-
34	Papua				-		-
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>3,996,000,000</b>	<b>120</b>	<b>100</b>	<b>3,987,909,950</b>	<b>99.8</b>

Update data 21 Januari 2022

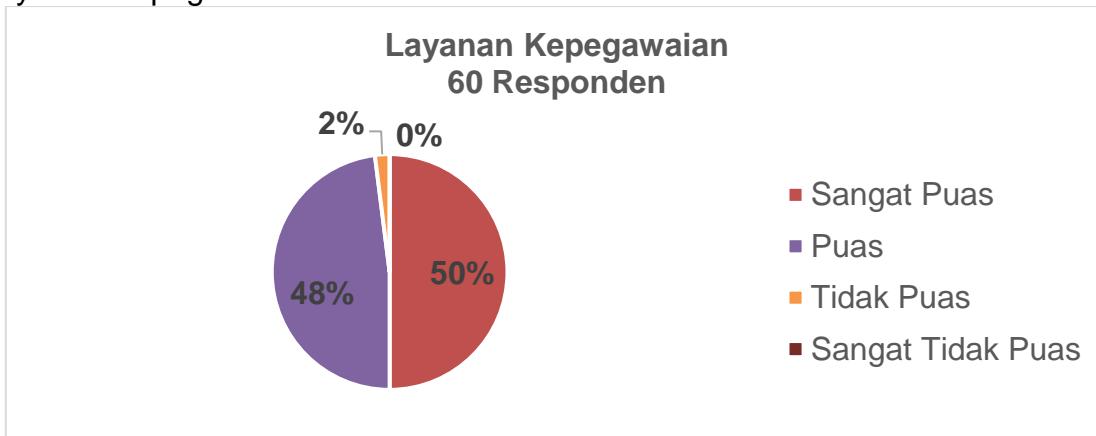
**Lampiran 27.**

**Hasil Survei**  
**Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Internal Subbagian Tata Usaha**  
**Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan**  
**Tahun 2021**

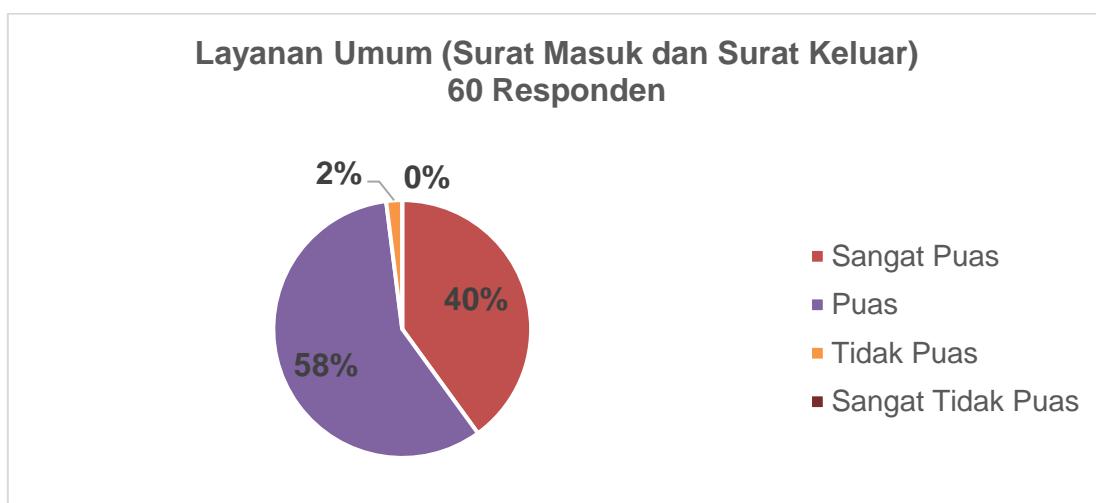
## 1. Layanan Keuangan dan Perbendaharaan



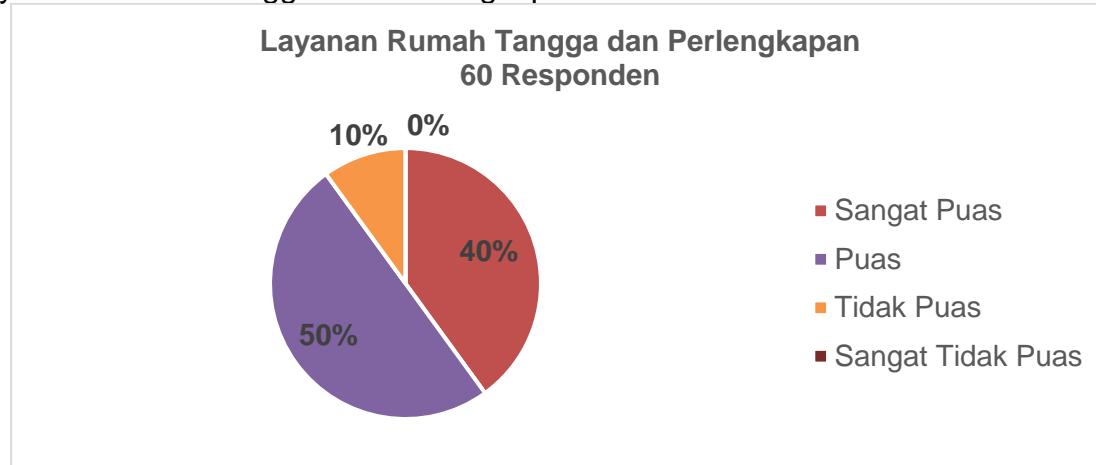
## 2. Layanan Kepegawaian



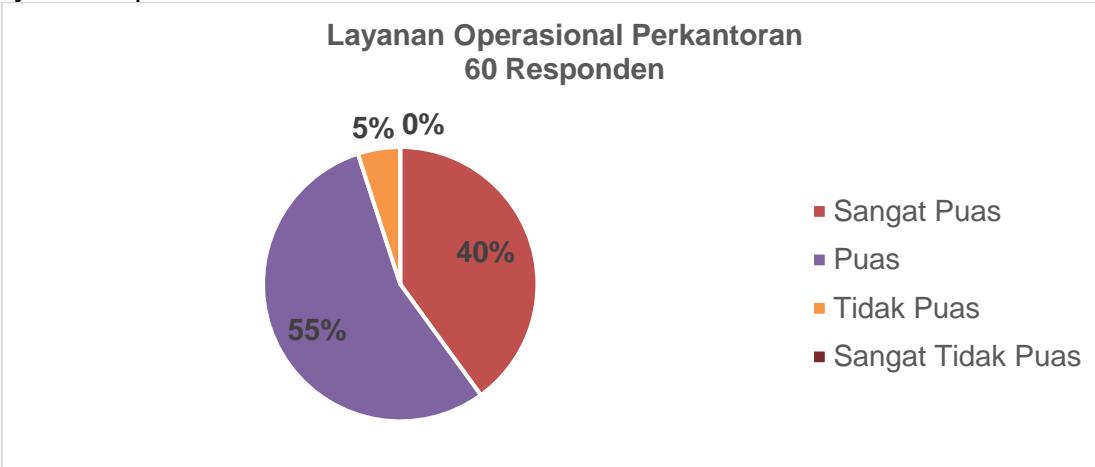
## 3. Layanan Umum (Surat Masuk dan Surat Keluar)



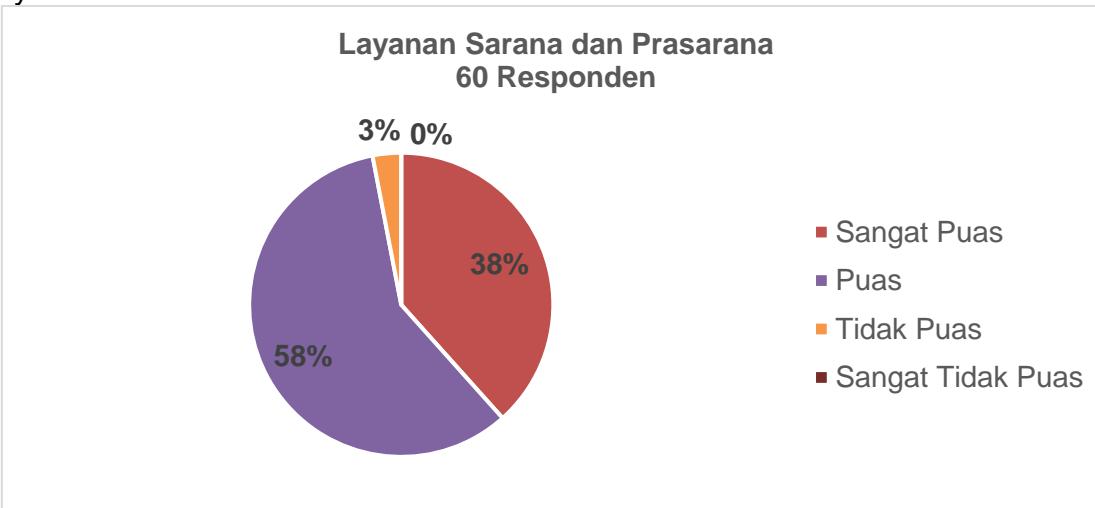
#### 4. Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan



#### 5. Layanan Operasional Perkantoran



#### 6. Layanan Sarana dan Prasarana



---

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

Jalan Aup No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp : 021-7805652/7806213

Fax : 021-7805652

Email : ditlin\_TP@pertanian.go.id

---